

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN TAHUN 2024



Pengaduan +62 823-5230-1751
Facebook: Hubmas RSUKT
Instagram: @rsukotatarakan
Email: rsukotatarakan@gmail.com

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
Jalan Aki Babu RT.01 Nomor 170
Kelurahan Karang Harapan
Kecamatan Tarakan Barat
Kota Tarakan, Kalimantan Utara
0551- 3809919/3809788/3808969

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat sehat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) telah selesai disusun, sebagaimana komitmen RSUKT dalam menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik serta mengedepankan prinsip keselamatan pasien. Terbitnya laporan ini diharapkan menjadi acuan bagi manajemen rumah sakit dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja secara menyeluruh di rumah sakit.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih membutuhkan penyempurnaan, sehingga butuh koreksi, saran dan masukan dari. Semoga laporan ini memberikan penjelasan yang memadai dan berkontribusi dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dengan pengelolaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik.

Tarakan, 17 Februari 2025

Direktur,



dr. Joko Haryanto, MM
Pembina Tingkat I IV.b
NIP. 197611112006021003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	2
C. Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Pohon Kinerja/Penjenjangan Kinerja	12
B. Perjanjian Kinerja	13
C. Rencana Aksi	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	53
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	

Daftar Gambar, Grafis dan Tabel

A. Daftar Gambar dan Grafis.

- Gambar 2.1 Ikhtisar Pohon Kinerja Hasil Penjenjangan Kinerja RSUD Kota Tarakan.
- Grafik 3.1 Capaian SPM RSUD Tahun 2020-2024.
- Grafik 3.2 Capaian Nilai IKM per Unsur Tahun 2024.
- Grafik 3.3 Tren Nilai SKM RUKT Tahun 2020-2024

B. Daftar Tabel.

- Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama RSUD.
- Tabel 2.2 Rekapitulasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) RSUD Tahun 2024.
- Tabel 2.3 Rencana Aksi RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.1 Capaian Kinerja Utama RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kota Tarakan Tahun 2020-2024.
- Tabel 3.3 Perbandingan Capaian SPM RSUD Tahun 2022-2024.
- Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Persentase Capaian SPM RSUD Kota Tarakan Tahun 2024.
- Tabel 3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya Persentase Capaian SPM RSUD Kota Tarakan Tahun 2024.
- Tabel 3.6 Pemenuhan Sumber Daya RS Berdasarkan Standar Penilaian Tahun 2023 dan 2024.
- Tabel 3.7 Program dan Kegiatan Pendukung Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar RSUD Kota Tarakan Tahun 2024.
- Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Sumber Daya Persentase Pemenuhan Sumber Daya RSUD Sesuai Standar Tahun 2024.
- Tabel 3.9 Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Tarakan Tahun 2024.
- Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Tarakan Tahun 2024.
- Tabel 3.11 Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Sumber Daya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.13 Capaian Nilai Kinerja BLUD RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.14 Capaian Kinerja BLUD RSUD Tahun 2021 s.d Tahun 2024.
- Tabel 3.15 Program dan Kegiatan Pendukung Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.16 Analisis Efisiensi Sumber Daya Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.17 Analisis Efisiensi Sumber Daya Nilai SAKIP RSUD tahun 2024.
- Tabel 3.18 Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko BLUD RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Sumber Daya Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko RSUD Tahun 2024.
- Tabel 3.20 Realisasi Anggaran.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan amanat regulasi yang telah dibakukan sejak tahun 2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disingkat SAKIP. Regulasi ini mendefinisikan SAKIP yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pasal 4 Perpres ini menyebutkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja, yaitu, unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP, meliputi:

- 1) rencana strategis;
- 2) Perjanjian Kinerja;
- 3) pengukuran Kinerja;
- 4) pengelolaan data Kinerja;
- 5) pelaporan Kinerja; dan
- 6) revaluasi dan evaluasi Kinerja.

Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, RSUKT, merupakan unit organisasi dengan pengorganisasian berbentuk UOBK (Unit Organisasi Bersifat Khusus) dengan beberapa kewenangan yang dapat dijalankan secara mandiri, seperti, keuangan, pengelolaan aset, dan kepegawaian. Beroperasi sejak tahun 2019, RSUKT pada tahun 2020 langsung menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari pengelolaan keuangan APBD. Berstatus sebagai BLUD, menjadikan RSUKT sebagai entitas laporan keuangan yang wajib menyusun pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 2 ayat (2) Perpres tentang SAKIP yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, sehingga, RSUKT sebagai entitas laporan keuangan, juga diwajibkan mengimplementasikan SAKIP secara mandiri. Hal ini diperkuat dengan kebijakan RSUKT sejak tahun 2024 ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas, salah satunya yaitu, Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

Pengelolaan SAKIP secara mandiri dilakukan RSUKT sejak tahun 2024, dimana penyusunan dan penilaian LAKIP pada kinerja RSUKT tahun 2023 telah dilakukan oleh tim penilai. Hasil penilaian pelaporan kinerja RSUKT pada tahun 2024 diperoleh nilai 62,66 dengan kategori B (Baik). Terdapat beberapa catatan koreksi dan perbaikan yang harus dilakukan RSUKT diantaranya yaitu, pada aspek: evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja, pelaporan kinerja dan perencanaan kinerja. Capaian ketiga aspek ini masih sangat rendah. Sepanjang tahun 2024, RSUKT, telah melakukan perbaikan terhadap seluruh siklus SAKIP. Secara rinci dituangkan dalam LAKIP tahun 2024 berikut ini.

B. Tugas dan Fungsi Organisasi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan 2eriodic², preventif, kuratif, 2eriodic²ative dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Dasar hukum pengorganisasian RSUKT diatur melalui Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 90 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Pasal 2 menyebutkan bahwa RSUKT adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kota Tarakan dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. Pasal 3 menyebutkan bahwa RSUKT mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna. Sesuai dengan Pasal 4 RSUKT mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- 2) pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- 4) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Sejak beroperasi sampai dengan saat ini, RSUKT ditetapkan sebagai rumah sakit umum dengan klasifikasi kelas C, dengan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 yaitu terdiri dari:

- Direktur, membawahi:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan;
 - 2) Kepala Bidang Penunjang;
 - 3) Kepala Bidang Hubungan Masyarakat;
 - 4) Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan.
- Kepala Bidang Pelayanan, membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- Kepala Bidang Penunjang, membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik; dan
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
- Kepala Bidang Humas membawahi:
 - 1) Kepala Seksi Informasi, Hukum dan Pengaduan; dan
 - 2) Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama.
- Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi;
 - 3) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja.

Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Direktur mempunyai tugas membantu wali kota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. Pada ayat (3) menjelaskan bahwa Direktur menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- 4) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; dan
- 5) evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bidang Pelayanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pelayanan yang mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu, melaksanakan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. Ayat (2) menyebutkan bahwa Kepala Bidang pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- 3) pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan; dan

- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan membawahi Seksi Pelayanan Medik yang dipimpin oleh Kepala Seksi dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yaitu melaksanakan pelayanan medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan. Kepala Seksi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan pemberian pelayanan medis;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
- 3) upaya keselamatan pasien di seksi pelayanan medis;
- 4) pengelolaan rekam medis;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, termasuk implementasi standar akreditasi RS; dan
- 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan. Seksi ini dipimpin oleh Kepala Seksi dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu melaksanakan pelayanan Keperawatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, dan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- 3) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di seksi keperawatan dan kebidanan;
- 4) pemantauan, evaluasi pelayanan keperawatan dan kebidanan, termasuk implementasi standar akreditasi RS; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penunjang. Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang dengan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, yaitu, melaksanakan pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medik dan kendali mutu pelayanan penunjang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Kepala Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
- 3) pelaksanaan kendali mutu dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;

- 4) pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penunjang membawahi Seksi Penunjang Medik dan Seksi Penunjang Non Medik yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi. Pasal 15 menyebutkan bahwa Kepala Seksi Penunjang Medik memiliki tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang. Kepala Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- 3) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis, termasuk implementasi standar akreditasi RS; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 16 menyebutkan bahwa Kepala Seksi Penunjang Non Medik memiliki tugas melaksanakan pelayanan penunjang non medik, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang, serta menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang non medik;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang non medik;
- 3) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang non medik;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang non medis, termasuk implementasi standar akreditasi RS; dan
- 5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang

Bidang Humas. Pasal 17 menyebutkan bahwa Kepala Bidang Humas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan humas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyusun rencana program kegiatan kajian hukum, bantuan hukum dan legalitas hukum;
- 2) menyusun program pemasaran dan kerjasama dengan pihak ketiga;
- 3) menyusun rencana kegiatan kehumasan dan hubungan antar 5eriodi;
- 4) menyusun rencana penyelenggaraan informasi dan publikasi;
- 5) menyusun rencana costumer care, survey kepuasan pelanggan;
- 6) menyusun rencana sistem dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pemasaran dan peningkatan citra pelayanan;

- 7) menyusun rencana pengembangan sistem dan prosedur untuk mendukung kelancaran kegiatan humas; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Kepala Bidang Humas membawahi Kepala Seksi Informasi, Hukum dan Pengaduan, dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu, melaksanakan pemberian informasi, kajian hukum dan penanganan pengaduan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Humas, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan publikasi kepada masyarakat;
- 2) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kajian hukum, bantuan hukum dan legalitas hukum;
- 3) melaksanakan kajian produk hukum RSUD;
- 4) melaksanakan kajian hukum kerjasama dengan pihak ketiga;
- 5) melaksanakan penanganan keluhan pelanggan;
- 6) melaksanakan survey kepuasan pelanggan;
- 7) menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur untuk mendukung kelancaran kegiatan informasi, hukum, dan pengaduan;
- 8) melaksanakan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di seksi informasi, hukum dan pengaduan;
- 9) menyiapkan SPO yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan informasi, hukum, dan pengaduan;
- 10) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pada seksi informasi, hukum dan pengaduan, termasuk implementasi standar akreditasi RS; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Humas.

Pasal 19 menyebutkan bahwa Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran dan kerjasama rumah sakit, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Humas. Kepala Seksi Pemasaran dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyiapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan pemasaran dan peningkatan citra pelayanan;
- 2) melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan pemasaran;
- 3) melaksanakan pembinaan hubungan dengan pihak ketiga;
- 4) menyiapkan pengembangan sistem dan prosedur untuk mendukung kelancaran kegiatan pemasaran dan kerjasama;
- 5) menyiapkan SPO yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemasaran dan kerjasama;

6) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemasaran dan kerjasama, termasuk implementasi standar akreditasi RS; dan

7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Humas.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan. Pasal 20 menyebutkan bahwa Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan, perencanaan, keorganisasian dan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan, penganggaran dan perbendaharaan, pengelolaan piutang dan pendapatan serta mengelola sistem akuntansi dan laporan keuangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana dan kegiatan kesekretariatan;
- 2) penyusunan rencana dan kegiatan perencanaan dan penyusunan program;
- 3) penyusunan rencana dan kegiatan keorganisasian dan kepegawaian;
- 4) penyusunan rencana dan kegiatan pendidikan serta pelatihan;
- 5) penyusunan rencana dan kegiatan kerjasama pendidikan serta penelitian;
- 6) penyusunan rencana dan pelaksanaan penganggaran dan perbendaharaan;
- 7) penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan piutang dan pendapatan;
- 8) penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem akuntansi dan laporan keuangan;
- 9) pelaksanaan kendali mutu, biaya, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan;
- 10) pelaksanaan pengembangan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelayanan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
- 11) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- 12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21 menyebutkan bahwa Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtanggaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan;
- 2) menyiapkan dan melaksanakan tugas kerumahtanggaan termasuk pengelolaan aset; pemeliharaan, ketertiban, keamanan;
- 3) menyiapkan SPO yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- 4) pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 5) membantu mengembangkan sistem dan prosedur untuk kelancaran kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- 6) mengendalikan, evaluasi dan melaporkan kegiatan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- 7) merencanakan dan melakukan kajian tentang organisasi Rumah Sakit;
- 8) merencanakan dan melaksanakan pengelolaan pegawai;
- 9) merencanakan dan mengembangkan sistem kepegawaian, karir dan kompetensi;
- 10) mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan kepegawaian;
- 11) melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keorganisasian dan kepegawaian;
- 12) melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai rumah sakit;
- 13) menyusun program kesejahteraan pegawai;
- 14) memetakan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan unit kerja;
- 15) menyiapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan kajian pengembangan organisasi;
- 16) menyiapkan dan melaksanakan sistem dan prosedur untuk melaksanakan kegiatan kajian pengembangan dan peningkatan kompetensi pegawai;
- 17) menyiapkan SPO yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- 18) merencanakan dan melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- 19) merencanakan dan melaksanakan kerjasama pendidikan baik SDM kesehatan maupun SDM non kesehatan;
- 20) mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan;
- 21) melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kerjasama pendidikan; dan
- 22) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

Subbagian Keuangan dan Akuntansi. Pasal 22 menyebutkan bahwa Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penerapan sistem akuntansi dan laporan keuangan serta pelaksanaan verifikasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) merencanakan dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan akuntansi;
- 2) koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan keuangan dan akuntansi;
- 3) mengembangkan sistem dan prosedur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan keuangan dan akuntansi;
- 4) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan dan akuntansi;
- 5) menyiapkan dan melaksanakan sistem akuntansi berbasis kas maupun akrual sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan);

- 6) membantu mengembangkan sistem dan prosedur untuk kelancaran penerapan akuntansi dan laporan keuangan;
- 7) menyiapkan penyusunan laporan keuangan secara 9eriodic sesuai ketentuan;
- 8) menyiapkan dan menyampaikan laporan keuangan secara 9eriodic;
- 9) melaksanakan perhitungan biaya satuan untuk penetapan tarif pelayanan;
- 10) menyiapkan penyusunan laporan akuntansi manajemen termasuk laporan dari perhitungan biaya satuan;
- 11) mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan;
- 12) menyiapkan SPO yang diperlukan untuk pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 23 menyebutkan bahwa Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana dan penyusunan program, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dengan menyelenggarakan fungsi:

- 1) menyusun rencana strategi dan rencana kerja tahunan Rumah Sakit;
- 2) merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 3) menyusun Laporan kinerja Rumah Sakit secara 9eriodic sesuai kebutuhan;
- 4) menyiapkan pelaksanaan SPO yang diperlukan untuk penyusunan rencana dan program;
- 5) melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan rencana dan program;
- 6) mengembangkan sistem dan prosedur untuk meningkatkan kinerja sistem perencanaan dan penyusunan program;
- 7) menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja Rumah Sakit minimal secara bulanan dan tahunan;
- 8) melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pelayanan dan non pelayanan;
- 9) melaksanakan kegiatan pengolahan data menjadi informasi yang diperlukan untuk pelaporan, evaluasi dan bahan penyusunan rencana serta program;
- 10) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja Rumah Sakit;
- 11) pengelolaan sistem dan prosedur pengolahan data dan informasi;
- 12) mengembangkan sistem informasi Rumah Sakit berbasis teknologi informasi; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. RSUKT menjalankan hal ini dilaksanakan dengan memperkuat unit fungsional seperti pembentukan Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit, Komite, Tim, Instalasi, Unit dan Ruangan. Saat ini RSUKT telah membentuk Komite yaitu:

- 1) Komite Medik;
- 2) Komite Keperawatan;
- 3) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
- 4) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien; dan
- 5) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.

Instalasi, Unit dan Ruangan yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dan pengunjung rumah sakit, yaitu:

- 1) Gawat Darurat;
- 2) Rawat Inap;
- 3) Rawat Jalan;
- 4) Farmasi;
- 5) Radiologi;
- 6) Laboratorium;
- 7) Bank Darah Rumah Sakit;
- 8) Bedah Sentral;
- 9) Pemulasaran Jenazah;
- 10) Persalinan;
- 11) Gizi;
- 12) Laundry;
- 13) SIM RS;
- 14) Peningkatan dan Pengembangan Staf RS;
- 15) Promosi dan Kesehatan Rumah Sakit;
- 16) Pengadaan Barang/Jasa BLUD;
- 17) Mediasi Medis;
- 18) CSSD.

C. Isu Strategis.

Terdapat isu-isu strategis bidang kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan, yaitu:

- 1) Angka Kematian Ibu di Tarakan sepanjang 2 (dua) tahun terakhir tercatat mengalami kenaikan dari batas maksimal yang telah ditetapkan tingkat Kota Tahun

2021 sebesar 63 per 100.000 KH, Tahun 2022 sebesar 42 dan tahun 2023 sebesar 127 per 100.000 kelahiran.

- 2) Angka Kematian Bayi menunjukkan angka peningkatan, Tahun 2021 sebesar 4 per 1000, Tahun 2022 sebesar 7 per 1000, dan 7 per 1000 kelahiran tahun 2023.
- 3) Masih ditemukannya kasus stunting balita di Kota Tarakan. Meskipun prevalensi masih dibawah nasional namun untuk target yang ditetapkan Pemerintah Kota Tarakan masih tinggi. Berdasarkan data Capaian Tahun 2023 sebesar 4,5 % dari target 7,5 %.
- 4) Pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui siklus kehidupan baik memenuhi standar mutu yang masih belum maksimal.
- 5) Sebagai kota yang berkembang dan statusnya sebagai kota transit bagi orang dan barang yang akan ke wilayah utara Kalimantan, pola penyakit di Tarakan mengalami transisi epidemiologi. Pola penyakit yang terjadi saat ini di Tarakan yaitu masih tersebarunya penyakit menular, meningkatnya kasus penyakit tidak menular, dan re- emerging disease (triple burden), prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat.
- 6) Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
- 7) Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata dan mencukupi baik dalam jumlah maupun jenis tenaga terutama dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dan tenaga Kesehatan lainnya. Selain itu, kompetensi tenaga Kesehatan yang juga perlu ditingkatkan sehingga sesuai dengan standard keahlian yang harus dimiliki.
- 8) Ketersediaan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan kebutuhan logistik yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitas sehingga sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan isu strategis bidang kesehatan, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis bidang kesehatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat.
- 2) Tujuan 2: Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik; dan
 - b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Pohon Kinerja/Penjenjangan Kinerja.

Pada tahun 2024 RSUD telah melakukan Penjenjangan Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam proses Penjenjangan Kinerja, yaitu:

- 1) menentukan Hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan Kinerja;
- 2) menentukan faktor kunci keberhasilan (critical success factor);
- 3) menguraikan faktor kunci keberhasilan (critical success factor) kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional;
- 4) merumuskan Indikator Kinerja; dan
- 5) menerjemahkan pohon Kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Adapun ikhtisar Penjenjangan Kinerja yang telah diterjemahkan dalam Pohon Kinerja RSUD tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.
IKHTISAR POHON KINERJA HASIL PENJENJANGAN KINERJA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Outcome 1	Outcome 2	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan IK: Indeks Keluarga Sehat	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola PD Dinkes IK 1: Indeks Kualitas Pelayanan Publik IK 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinkes	
Critical Success Factor 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut IK 1: Persentase Capaian SPMRS IK 2: Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS	Critical Success Factor 2 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat di RS IK: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di RS	Critical Success Factor 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS IK 1: Nilai Kinerja BLUD RS IK 2: Nilai SAKIP RS IK 3: Nilai Maturitas Pengelolaan Resiko RS
Kondisi Operasional 1 1. Terlaksananya Pelayanan Gawat Darurat Sesuai Standar 2. Terlaksananya Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar 3. Angka Kematian Ibu Karena Persalinan 4. Tersedianya Dokter Spesialis Pada Layanan Rawat Jalan 5. Tersedianya Tim PONEK 6. Tersedianya Petugas IGD yang memiliki kemampuan menangani life saving Dst.	Kondisi Operasional 3 1. Tersedianya dokumen peraturan internal RS 2. Terlaksananya Tahapan Survei Kepuasan Masyarakat di RS 3. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pasien oleh RS 4. Meningkatnya Pemenuhan Kewajiban RS 5. Tersedianya register dan laporan dokumen produk hukum RS 6. Tersedianya dokumen Perjanjian Kerja Sama yang berlaku Dst.	Kondisi Operasional 4 1. Meningkatnya Rentabilitas Pengelolaan Keuangan RS 2. Meningkatnya Nilai Likuiditas Pengelolaan Keuangan RS 3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi 4. Meningkatnya Pengelolaan SDM RS 5. Terlaksananya movev pengelolaan resiko strategis rs 6. Periode Penagihan Piutang Efektif 7. Meningkatnya Rata-Rata Jam Pelatihan Per Karyawan 8. Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran RBA BLUD RSUD Definitif Dst.
Kondisi Operasional 2 1. Terlaksananya Pelayanan Farmasi Sesuai Standar 2. Terlaksananya Pelayanan Gizi Sesuai Standar 3. Meningkatnya Capaian ASPAK RS 4. Meningkatnya Level IT Terintegrasi 5. Tersedianya Formularium RS Terkini 6. Meningkatnya safety index RS Dst.		

Berdasarkan pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa Penjenjangan Kinerja RSUD tahun 2024 telah memetakan level kinerja dari tingkat yang paling tinggi, yaitu *Strategic Objectives* ke tingkat menengah yaitu *Tactical Objectives* sampai ke tingkat

operasional, yaitu, *Operational Objectives*. Terdapat hasil penjenjangan kinerja yang bersifat *crosscutting*, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di RS;
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS; dan
- 3) Menurunnya Angka Kematian Ibu karena Persalinan.

Secara rinci Pohon Kinerja hasil Penjenjangan Kinerja yang disusun oleh RSUKT terlampir dalam laporan ini.

B. Perjanjian Kinerja

Setelah penyusunan Penjenjangan Kinerja menjadi Pohon Kinerja, RSUKT melakukan penyusunan *cascading* sebagai dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja. Hasil penilaian pada aspek Perencanaan Kinerja LAKIP tahun 2023, nilai yang diperoleh RSUKT yaitu 18,60 (bobot: 30). Pada tahun 2024 RSUKT melakukan beberapa perbaikan untuk memaksimalkan nilai pada aspek Perencanaan Kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU). RSUKT menetapkan IKU sebagai indikator kinerja Direktur RSUKT yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur. Adapun IKU RSUKT yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama RSUKT

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Persentase Capaian SPM Pelayanan Rumah Sakit	100%
		2	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70%
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di RS	83
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	4	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS	83
		5	Nilai/ Predikat SAKIP RS	70-80 (Baik)
		6	Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Resiko RS	3,0 (Terdefinisi)

Berdasarkan pada IKU pada tabel di atas, RSUKT kemudian melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja pada semua level jabatan di RSUKT. Adapun rekapitulasi Perjanjian Kinerja yang disusun pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) RSUKT Tahun 2024

Unit	Ketersediaan PK	Ketersediaan PK Perubahan	Jumlah Dokumen	Keterangan
Direktur	√	√	1	
Bidang Pelayanan:				
1) Kepala Bidang	√	√	1	
2) Kepala Seksi Pelayanan Medik	√	√	1	
3) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	√	√	1	
Bidang Penunjang:				
1) Kepala Bidang	√	√	1	
2) Kepala Seksi Penunjang Medik	√	√	1	
3) Kepala Seksi Penunjang Non Medik	√	√	1	
Bidang Humas:				
1) Kepala Bidang	√	√	1	Terjadi pergantian Kepala Bidang Humas pada tahun 2024
2) Kepala Seksi Informasi Hukum dan Pengaduan	√	√	1	
3) Kepala Seksi Pemasaran dan Kerja Sama	√	√	1	
Bagian Tata Usaha dan Keuangan:				
1) Kepala Bagian	√	√	1	
2) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	√	√	1	
3) Kepala Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	√	√	1	
4) Kepala Subbagian Keuangan dan Akuntansi	√	√	1	
5) Pelaksana Bagian Tata Usaha dan Keuangan	√	√	25	

Berdasarkan pada tabel di atas, RSUKT telah melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan kepada seluruh pimpinan rumah sakit dan diperluas ke seluruh staf pelaksana di Bagian Tata Usaha dan Keuangan. Secara rinci dokumen Perjanjian Kinerja tertuang dalam lampiran laporan ini.

C. Rencana Aksi

Setelah penyusunan Perjanjian Kinerja, RSUKT menyusun Rencana Aksi yang secara rinci tertuang dalam lampiran laporan ini.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM RS	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Penyediaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26 unit	Pengadaan alkes bersumber dana APBD	3,634,863,843					Bidang Penunjang
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	Pengadaan dan pemeliharaan alkes dan alat penunjang bersumber dana BLUD						Bidang Penunjang
												Monitoring Capaian SPM						Semua Bidang/ Bagian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
	Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar	70%	70%	70%	70%		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RS yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1: 1000 dan/atau dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 unit	Pengadaan meubelair RS dan Sep Up Gedung Paviliun	200,000,000					Bidang Penunjang

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	Pembangunan/ Rehab Instalasi VK dan IGD, Taman Area Parkir, dan Rehab Masjid RSUKT						Bidang Penunjang
												Pemeliharaan Bangunan RS						Bidang Penunjang
												Pemenuhan obat, BMHP dan Logistik RS						Bidang Penunjang
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di RS	83	83	83	83	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Publikasi Hasil Survey IKM	60,173,189,957					Bidang Humas
												Penanganan Komplain Layanan RS						Bidang Humas
												Monev dan penyusunan laporan pemenuhan kewajiban RS						Bidang Humas

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
												Monev dan penyusunan laporan pemenuhan hak Pasien di RS						Bidang Humas
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Nilai Evaluasi Kinerja RS	83	83	83	83	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Tenaga ASN	11,647,658,259					Bagian Tata Usaha dan Keuangan
												Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Tenaga BLUD						Bagian Tata Usaha dan Keuangan
												Penyusunan Laporan Kinerja RS '						Bagian Tata Usaha dan Keuangan
		Nilai Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja RS	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Pengelolaan Gaji, Insentif, Honorarium dan Jaminan Ketenagakerjaan	5,989,378,000					Bagian Tata Usaha dan Keuangan
												Penyusunan Laporan Kinerja RS						Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								T W 1	T W 2	T W 3	T W 4	
		Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko RS	3,0 (Terdefinisi)	3,0 (Terdefinisi)	3,0 (Terdefinisi)	3,0 (Terdefinisi)						Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko RS dan Monitoring Pelaksanaan Manajemen Risikodi RS						Komite Mutu, Semua Bidang dan Bagian

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut capaian Kinerja Utama RSUKT tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Utama RSUKT Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM RS	79.39%	100%	81.33%	81.33%
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar	75.05%	70%	79.03%	100.00%
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82.45	83	82.17	99.00%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS	90	83	83.19	100.00%
		Nilai SAKIP RS	Belum Dinilai	70	62.66	89.51%
		Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Resiko RS	3 (Terdefenisi)	3 (Terdefenisi)	3 (Terdefenisi)	100.00%

Berikut analisis Capaian Kinerja per Sasaran:

- 1) Sasaran 1. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Indikator 1. Capaian SPM RS.

Tabel 3.2
Capaian Standar Pelayanan Minimal
RSU Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Target Akhir Periode Renstra
Persentase Capaian SPM RS							
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	Belum dinilai	76,30%	77,71%	78,18%	79,39%	81.33%	81.33%
Capaian	Belum dinilai	76,30%	77,71%	78,18%	79,39%	81.33%	81.33%

Grafik 3.1
Capaian SPM RSU Kota Tarakan Tahun 2020-2024



Berikut capaian indikator Standar Pelayanan Minimal masing-masing unit tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian SPM RSUKT Tahun 2022-2024

No	Jenis Pelayanan	2022			2023			2024		
		Indikator Terca pai	Indikator Penilaian	% Capaian	Indikator Terca pai	Indikator Penilaian	% Capaian	Indikator Terca pai	Indikator Penilaian	% Capaian
1.	Pelayanan gawat darurat	5	8	62,50	7	8	87,50	7	8	87,50
2.	Pelayanan rawat jalan	9	10	90,00	8	10	80,00	7	10	70,00
3.	Pelayanan rawat inap	8	14	57,14	11	14	78,57	12	14	85,71
4.	Pelayanan bedah sentral	10	11	90,91	10	11	90,91	10	11	90,91
5.	Pelayanan persalinan dan perinatologi	10	10	100	10	10	100	10	10	100
6.	Pelayanan intensif	4	7	57,14	5	7	71,43	4	7	57,14
7.	Pelayanan radiologi	6	7	85,71	6	7	85,71	5	7	71,43
8.	Pelayanan patologi klinik	8	10	80,00	8	10	80,00	8	10	80,00
9.	Pelayanan rehabilitasi medik	3	5	60,00	3	5	60,00	3	5	60,00
10.	Pelayanan farmasi	5	7	71,43	4	7	57,14	3	7	42,86
11.	Pelayanan gizi	5	6	83,33	5	6	83,33	5	6	83,33

No	Jenis Pelayanan	2022			2023			2024		
		Indikator Tercapai	Indikator Penilaian	% Capaian	Indikator Tercapai	Indikator Penilaian	% Capaian	Indikator Tercapai	Indikator Penilaian	% Capaian
12.	Pelayanan transfusi darah	2	4	50,00	1	4	25,00	3	5	60.00
13.	Pelayanan keluarga miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pelayanan rekam medik	4	6	66,67	4	6	66,67	5	6	83.33
15.	Pengelolaan limbah	4	5	80,00	4	5	80,00	4	5	80.00
16.	Pelayanan administrasi manajemen	14	16	87,50	15	16	93,75	15	16	93,75
17.	Pelayanan ambulans dan mobil jenazah	6	7	85,71	6	7	85,71	7	7	100
18.	Pelayanan pemulasaran jenazah	5	7	71,43	6	7	85,71	6	7	85,71
19.	Pelayanan laundry	6	7	85,71	5	7	71,43	6	7	85,71
20.	Pelayanan pemeliharaan sarana rs	6	6	100	5	6	83,33	6	6	100
21.	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	5	6	83,33	4	6	66,67	5	6	83,33
22.	Keamanan	4	6	66,67	4	6	66,67	4	6	66,67
Jumlah		129	165	78,18	131	165	79,39	135	166	81.33

Target pada indikator ini yaitu 100% dimana capaian SPM tahun 2024 yaitu 81.33%. Pada tahun 2023 capaian SPM RS sebesar 79,39%. Secara nasional target SPM untuk pelayanan di RS yaitu sebesar 100%. RSUKT secara klasifikasi merupakan RS kelas C, sehingga RSUKT membandingkan capaian SPM dengan RS yang setipe di tingkat nasional, yaitu, berdasarkan LKIP yang dirilis oleh RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok.

Secara rinci analisis pencapaian per indikator SPM sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUKT Tahun 2024

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Gawat Darurat	1. Kemampuan menangani life saving	100%	100%
		2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/ BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku	100%	62.96%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		3. Ketersediaan tim Penanggulangan bencana	1 Tim	1 Tim
		4. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam	24 Jam
		5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit dilayani se-telah pasien datang	1 menit
		6. Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100%	100%
		7. Kematian pasien di IGD (≤ 8jam)	≤ 2 perseribu / 0,002 / 0,20%	0,11%
		8. Kepuasan pasien	≥ 70 %	81.34%
2	Pelayanan Rawat Jalan	1. Ketersediaan pelayanan	100%	100%
		2. Dokter pemberi pelayanan di poliklinik spesialis	100% dokter spesialis	100%
		3. Jam buka pelayanan dengan ketentuan	Senin-Kamis : 08.00 s/d 13.00. Jum'at : 08.00 – 11.00	100%
		4. Waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit	67.31 menit
		5. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	100%	100%
		6. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%
		7. Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)	Tersedia dengan tenaga terlatih	100%
		8. Peresepan obat sesuai formularium	100%	85.78%
		9. Pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60%	100%
		10. Kepuasan pasien	≥ 90%	82.36%
3	Pelayanan Rawat Inap	1. Ketersediaan pelayanan	100%	100%
		2. Pemberi pelayanan di Rawat Inap	100%	100%
		3. Tempat tidur dengan pengaman	100%	100%
		4. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%	100%
		5. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100%	100%
		6. Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00	90.93%
		7. Kejadian infesksi pasca operasi	≤ 1,5%	0%
		8. Kejadian infeksi nosokomial	≤ 9%	2.58%
		9. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat atau kematian	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		10. Pasien rawat inap tuberculosi yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100%
		11. Pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60%	100%
		12. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh*	≤ 5%	0.90%
		13. Kematian pasien ≥ 48 jam	≤ 0,24%	0.22%
		14. Kepuasan pasien	≥ 90%	81.58%
4	Pelayanan bedah sentral	1. Ketersediaan tim bedah	100%	100%
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi	100%	72.48%
		3. Kemampuan melakukan tindakan operatif	100%	100%
		4. Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	1 hari
		5. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%	100%
		6. Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%	100%
		7. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%	100%
		8. Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%	100%
		9. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salah penempatan ET	≤ 6%	0%
		10. Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1%	0%
		11. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	84.03%
5	Persalinan dan perinatologi	1. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG/ Dokter umum/ Bidan	100%
		2. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK	100%
		3. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operatif	Terlatih	100%
		4. Kemampuan menangani BBLR (1500-2500 gr)	Dokter SpOG, Dokter SPA, Dokter Sp.An	100%
		5. Kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia	100%	100%
		6. Pertolongan persalinan melalui seksio caesaria non rujukan	≤ 20%	14.63%
		7. Pelayanan kontrasepsi mantap dilakukan oleh SpOG atau SpB, atau SpU, atau dokter umum terlatih	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		8. Konseling peserta KB mantap oleh bidan terlatih	100%	100%
		9. Kematian ibu karena persalinan	a. perdarahan $\leq 1\%$ b. pre eklamsia $\leq 30\%$ c. sepsis $\leq 0,2\%$	0% 0% 0%
		10. Kepuasan pasien	$\geq 80\%$	90.75%
6	Pelayanan intensif	1. Pemberi pelayanan	100%	75,00%
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU	100%	77,50%
		3. Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator	100%	100%
		4. Kepatuhan terhadap <i>hand hygiene</i>	100%	92.66%
		5. Kejadian infeksi nosokomial	$< 21\%$	7.69%
		6. Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	$\leq 3\%$	0.60%
		7. Kepuasan pelanggan	≥ 70	84.04
7	Pelayanan radiologi	1. Pemberi pelayanan radiologi	Dokter spesialis radiologi, Radiografer	100%
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan radiografi	100%	66,67%
		3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorax	≤ 3 jam / 180 menit	96.52 menit
		4. Kerusakan foto	$\leq 2\%$	1,25%
		5. Tidak terjadinya kesalahan pemberian label	100%	100%
		6. Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan radiologi	Dokter spesialis radiologi	100%
		7. Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	83.26%
8	Pelayanan patologi klinik	1. Pemberi pelayanan laboratorium patologi klinik	Dokter Sp.PK, Analisis	100%
		2. Fasilitas dan peralatan	Sesuai kelas RS	98,35%
		3. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium patologi klinik	≤ 120 menit	36.10 menit
		4. Tidak adanya kejadian tertukar specimen	100%	100%
		5. Kemampuan memeriksa HIV – AIDS	Tersedia tenaga, peralatan & reagen	100%
		6. Kemampuan Mikroskopis TB Paru	Tersedia tenaga,	80.00%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
			peralatan & reagen	
		7. Ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium	Dokter spesialis patologi klinik	100%
		8. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%
		9. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu external	100%	100%
		10. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	81.83%
9	Pelayanan rehabilitasi medik	1. Pemberi pelayanan rehabilitasi medik	Sesuai persyaratan kelas RS	66,67%
		2. Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medis	Sesuai persyaratan kelas RS	72,73%
		3. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%
		4. Kejadian <i>Drop Out</i> pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	≤ 50%	0%
		5. Kepuasan pelanggan	≥ 80	84.70
10	Pelayanan Farmasi	1. Pemberi pelayanan farmasi	100%	67.57%
		2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	100%	70.34%
		3. Ketersediaan formularium	Tersedia dan <i>updated</i> paling lama 3 tahun	100%
		4. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	35.56 menit
		5. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	48.65 menit
		6. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%	100%
		7. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	82.96%
11	Pelayanan gizi	1. Pemberi pelayanan gizi	100%	100%
		2. Ketersediaan fasilitas & peralatan pelayanan gizi	100%	37,50%
		3. Ketepatan waktu pemberian makanan pada pasien	≥ 90%	100%
		4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%
		5. Sisa makanan yang tidak dimakan oleh pasien	≤ 20%	7.26%
		6. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	80.67%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
12	Pelayanan transfusi darah	1. Tenaga penyedia pelayanan bank darah rumah sakit	Sesuai standar BDRS	75%
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit	Sesuai standar BDRS	33.33%
		3. Kejadian reaksi transfusi	$\leq 0,01 \%$	0.39%
		4. Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit	100%	100%
		6. Kepuasan pelanggan	≥ 80	81.83
13	Pelayanan pasien keluarga miskin	1. Ketersediaan pelayanan untuk keluarga miskin	Tersedia	n/a
		2. Adanya kebijakan RS untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	n/a
		3. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin	≤ 15 menit	n/a
		4. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	n/a
		5. Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	n/a
		6. Kepuasan pelanggan	$\geq 80\%$	n/a
14	Pelayanan rekam medik	1. Pemberi pelayanan Rekam medik	100%	83,33%
		2. Waktu penyediaan dokumen Rekam medik rawat jalan	≤ 10 menit	7.54 menit
		3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	13.69 menit
		4. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%	100%
		5. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%	100%
		6. Kepuasan pelanggan	≥ 80	80.67
15	Pengelolaan limbah	1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah rumah sakit	100% (Permenkes No 1204 thn 2004)	100%
		2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah rumah sakit: padat, cair	Sesuai peraturan perundangan	80%
		3. Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan	100%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		4. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundangan	100%
		5. Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30mg/l, COD <80mg/l, TSS <30mg/l dan PH 6-9	100%
16	Administrasi dan manajemen	1. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	≥ 90%	100%
		2. Adanya peraturan internal rumah sakit	Ada	Ada
		3. Adanya peraturan karyawan rumah sakit	Ada	Ada
		4. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada
		5. Adanya perencanaan strategi bisnis rumah sakit	Ada	Ada
		6. Adanya perencanaan pengembangan SDM	Ada	100%
		7. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%
		8. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%	100%
		9. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%
		10. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	≥ 90%	100%
		11. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%
		12. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam	≤ 2 jam
		13. Cost recovery	≥ 60%	93.32%
		14. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%	100%
		15. Karyawan mendapat pelatihan min. 20 jam/tahun	≥ 60%	23.87%
		16. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100%	100%
17	Pelayanan ambulans dan mobil jenazah	1. Ketersediaan pelayanan ambulans dan mobil jenazah	24 jam	24 jam
		2. Penyedia pelayanan ambulans dan mobil jenazah (terlatih)	100%	100%
		3. Ketersediaan mobil ambulans dan mobil jenazah	Mobil Ambulans & mobil jenazah terpisah	100%
		4. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans/mobil jenazah di rumah sakit	≤ 30 menit	5 menit

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
		5. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	5 menit
		6. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yg menyebabkan kecacatan atau kematian	100%	100%
		7. Kepuasan pelanggan	≥ 80%	81.13%
18	Perawatan Jenazah	1. Ketersediaan pelayanan pemulasaraan jenazah	24 jam	24 jam
		2. Ketersediaan fasilitas kamar jenazah	100%	72,73%
		3. Ketersediaan tenaga di instalasi perawatan jenazah	100%	100%
		4. Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 15 menit setelah di kamar jenazah	5 menit
		5. Perawatan jenazah sesuai standar universal precaution	100%	100%
		6. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi jenazah	100%	100%
		7. Kepuasan pelanggan	≥ 80	81.13
19	Pelayanan laundry	1. Ketersediaan pelayanan laundry	100%	100%
		2. Adanya Penanggung jawab pelayanan laundry	100%	100%
		3. Ketersediaan fasilitas dan peralatan laundry	100%	89,58%
		4. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	100%
		5. Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100 %	100%
		6. Ketersediaan linen	2, 5 - 3 set x jumlah tempat tidur	3,17 x
		7. Ketersediaan linen steril untuk kamar operasi	100%	100%
20	Pemeliharaan sarana rumah sakit	1. Adanya Penanggung Jawab IPSRS	SK Direktur	Ada
		2. Ketersediaan bengkel kerja	Tersedia	Ada
		3. Waktu tanggap kerusakan alats 15 menit	≥ 80 %	98.54%
		4. Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan	100%	100%
		5. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%	100%
		6. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100%	100%

NO.	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
21	Pencegahan dan pengendalian infeksi	1. Adanya anggota tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75%	96.00%
		2. Ketersediaan APD di setiap instalasi/departemen	≥60 %	100%
		3. Rencana program PPI	Ada	Ada
		4. Pelaksanaan program PPI sesuai rencana	100%	100%
		5. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%	93.08%
		6. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosoco-mial / <i>health care associated infection</i> (HAI) di RS	≥ 75%	100%
22	Pelayanan Keamanan	1. Petugas keamanan bersertifikat pengamanan	100%	86.67%
		2. Sistem pengamanan	Ada	Ada
		3. Petugas Keamanan melakukan keliling RS	8 x / per sift	24
		4. Evaluasi terhadap system pengamanan	Setiap 3 bulan	100%
		5. Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan yg hilang	100%	100%
		6. Kepuasan pasien	≥ 90%	85,25%

Pelayanan Gawat Darurat Sesuai Standar. Capaian indikator ini yaitu 87,50%. Capaian indikator ini belum mencapai 100% disebabkan masih terdapat indikator input yang belum sesuai standar, yaitu, ketersediaan pemberi layanan kegawatdaruratan bersertifikat (ATLS/BTCLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku capaiannya sebesar 62,96%. Pada akhir tahun 2024 terdapat petugas IGD yang sertifikat wajibnya sudah tidak berlaku sehingga perlu pembaharuan dengan mengikuti diklat atau refreshing update sertifikat. Apabila dibandingkan dengan capaian indikator ini oleh RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok juga belum mencapai 100%, artinya, beberapa standar yang belum terpenuhi, sama dengan standar yang belum dipenuhi RSUKT.

Pelayanan Rawat Jalan Sesuai Standar. Capaian indikator ini yaitu 70%, dimana terdapat standar yang belum terpenuhi, yaitu, Waktu Tunggu Rawat Jalan ≤ 60 menit dengan capaian masih 69,58%, Peresepan Obat Sesuai Formularium 100% dengan capaian 85,78%, dan Tingkat Kepuasan Pasien ≥ 90% dengan capaian 82,36. Standar ini belum dipenuhi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, masih terdapat kekurangan tenaga pada jenis dokter spesialis yang memberikan pelayanan rawat jalan dan penyiapan obat rawat jalan yang belum efisien. Apabila dibandingkan

dengan capaian indikator ini oleh RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok telah mencapai 98,01%.

Pelayanan Rawat Inap Sesuai Standar. Capaian indikator ini yaitu, 78,57%. Standar yang belum terpenuhi pada indikator ini, yaitu, Ketepatan Waktu Visite Dokter Spesialis pukul 08.00—14.00 dengan capaian 90,93% dan Kepuasan Pasien $\geq 90\%$ dengan capaian 81,58%. Standar yang belum terpenuhi pada indikator ini disebabkan masih terdapat kekurangan pada tenaga dokter spesialis dan dokter spesialis yang tersedia masih ada yang berstatus dokter paruh waktu. Upaya yang dilakukan oleh RSUKT dalam pemenuhan dokter spesialis yaitu mengusulkan dokter mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis sesuai kebutuhan pelayanan dan saat ini sedang menempuh pendidikan. Capaian standar pada indikator ini oleh RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok yang belum sesuai standar yaitu Kepuasan Pelanggan 82,05% dan Kematian Pasien > 48 jam dengan capaian 2,78% (standar: $\leq 0,24\%$).

Pelayanan Bedah Sentral Sesuai Standar. Capaian indikator ini 90,91%. Standar yang belum terpenuhi pada indikator ini yaitu Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Operasi 72,48% (standar: 100%). Upaya yang dilakukan dalam memenuhi standar peralatan yaitu melalui pengadaan peralatan dari anggaran BLUD dan APBD yang direalisasikan pada tahun 2024. Capaian kinerja RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok pada indikator ini sebesar 100%.

Pelayanan Persalinan dan Perinatologi Sesuai Standar. Capaian kinerja pada indikator ini yaitu sebesar 100%.

Pelayanan Intensif Sesuai Standar. Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 57,14% (target: 100%). Terdapat standar yang belum memenuhi target, yaitu, standar Pemberi Layanan 75%, Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Ruang ICU 77,50%, Kepatuhan terhadap Hand Hygiene 92,66%. Pemenuhan standar yang belum memenuhi target pada indikator ini disebabkan karena masih terdapat petugas ICU yang belum mengikuti pelatihan sesuai yang dipersyaratkan dalam pelayanan ICU dan HCU. Pemenuhan peralatan dan fasilitas telah dipenuhi pada tahun 2024 melalui pengadaan bersumber dana BLUD dan APBD. Petugas ICU telah diusulkan untuk mengikuti pelatihan bersumber dana BLUD. Sedangkan peningkatan kepatuhan hand hygiene melalui edukasi rutin dan pengawasan rutin oleh Komite PPI RS. Pada tahun 2024 juga telah tersedia tenaga dokter spesialis anestesi yang diangkat sebagai Kepala Instalasi ICU. Capaian kinerja RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok pada indikator ini sebesar 100%.

Pelayanan Radiologi Sesuai Standar. Capaian kinerja indikator ini 71,43% (target: 100%). Standar yang belum memenuhi target pada indikator ini, yaitu,

Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Radiografi 66,67%. Peralatan yang belum tersedia saat ini diantaranya CT-Scan, sehingga untuk pemeriksaan ini, pasien dirujuk ke RS lain. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi standar peralatan pada layanan radiologi, yaitu, pengusulan pemenuhan melalui program KJSU KIA hibah peralatan dari Kementerian Kesehatan RI dan pemenuhan ruang pemeriksaan melalui usulan APBD T.A 2025.

Pelayanan Patologi Klinik Sesuai Standar. Capaian kinerja pada indikator ini 80,00%. Standar yang belum terpenuhi pada indikator ini, yaitu, Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan 96,35% dan Ketersediaan Tenaga, Peralatan dan Reagen dalam melakukan Pemeriksaan Mikroskopis TB Paru 80%. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi standar pada indikator ini yaitu melalui pemenuhan fasilitas, peralatan dan BMHP serta peningkatan kapasitas petugas laboratorium. Capaian kinerja RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok pada indikator ini yang belum sesuai target yaitu pada pemenuhan standar kepuasan pelanggan pada layanan laboratorium 70,34% (standar: $\geq 80\%$).

Pelayanan Rehabilitasi Medik Sesuai Standar. Capaian kinerja pada indikator ini 60%. Standar yang belum terpenuhi, yaitu, Pemberi Pelayanan Rehabilitasi Medik 66,67% dan Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Rehabilitasi Medik 72,73%. Upaya yang dilakukan dalam memenuhi standar peralatan yaitu melalui pengadaan peralatan dari anggaran BLUD dan APBD yang direalisasikan pada tahun 2024. Mengingat keterbatasan anggaran melalui BLUD sehingga pemenuhan peralatan dan fasilitas secara bertahap dan diusulkan juga melalui APBD setiap tahun untuk pembangunan ruang rehabilitasi medik yang memadai.

Pelayanan Farmasi Sesuai Standar. Capaian kinerja indikator ini 42,86% (standar: 100%). Capaian standar yang masih rendah pada indikator ini, yaitu, Ketersediaan Pemberi Layanan Farmasi 67,57%, Waktu Tunggu Pelayanan Obat Jadi masih diatas 30 menit (standar: ≤ 30 menit), Waktu Tunggu Pelayanan Obat Racikan masih diatas 60 menit (standar: ≤ 60 menit) dan Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Pelayanan Farmasi 70,34% (standar 100%). Capai kinerja indikator ini belum sesuai target disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, kekurangan tenaga pada layanan kefarmasian serta belum tersedia fasilitas dan peralatan yang mendukung pelayanan obat jadi dan pelayanan obat racikan semakin cepat. Upaya yang telah dilakukan diantaranya, menindaklanjuti pendampingan yang telah dilakukan oleh RS Unhas yang memberikan rekomendasi perbaikan pada layanan kefarmasian di rawat jalan. Laporan capaian kinerja RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok untuk indikator ini sudah sesuai standar.

Pelayanan Gizi Sesuai Standar. Capaian kinerja indikator ini 83,33%. Standar yang belum tercapai, yaitu, Ketersediaan Pelayanan Konsultasi Gizi 37,50%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena belum tersedia Pelayanan Konsultasi Gizi pada Instalasi Rawat Jalan. Laporan capaian kinerja RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok untuk indikator ini sudah sesuai standar untuk standar Ketepatan Waktu Pemberian Makan kepada Pasien, Persentase Sisa Makanan yang Tidak Termakan oleh Pasien, dan Persentase Tidak Adanya Kesalahan dan Pemberian Diet.

Pelayanan Transfusi Darah Sesuai Standar. Capaian kinerja indikator ini 60%. Standar yang belum terpenuhi yaitu Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Bank Darah Rumah Sakit 33,33% (standar 100%). Upaya yang dilakukan dalam memenuhi standar peralatan yaitu melalui pengadaan peralatan dari anggaran BLUD dan APBD yang direalisasikan pada tahun 2024. Mengingat keterbatasan anggaran melalui BLUD sehingga pemenuhan peralatan dan fasilitas secara bertahap dan diusulkan juga melalui APBD setiap tahun untuk pembangunan ruang rehabilitasi medik yang memadai. Dibandingkan dengan capaian standar oleh RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota Depok untuk indikator ini, masih terdapat standar yang belum 100%, yaitu, pemenuhan kebutuhan darah 91% (standar: 100%).

Pelayanan Rekam Medik Sesuai Standar. Capaian kinerja indikator ini 83,33%. Standar yang belum terpenuhi yaitu Pemenuhan Petugas Pemberi Pelayanan Rekam Medik 83,33% (standar: 100%). Masih terdapat kekurangan petugas perekam medis dan informasi kesehatan sesuai dengan formasi kebutuhan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya melalui pengadaan/rekrutmen pegawai BLUD dan pemenuhan kompetensi petugas melalui pendidikan dan pelatihan.

Pengelolaan Limbah Sesuai Standar. Secara umum pengelolaan limbah RS sudah sesuai standar, 100%. Tetapi masih terdapat standar yang belum memenuhi target, yaitu, Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Pengelolaan Limbah RS 80% (target: 100%). Sehingga secara total pemenuhan standar, capaian kinerja untuk indikator ini yaitu sebesar 80%. RSUKT terus berupaya dalam memenuhi standar fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah yang dianggarkan melalui BLUD dan upaya lain yaitu, melakukan addendum pada kontrak kerja pengelolaan limbah dengan menuangkan persyaratan izin KLH dan standar baku mutu.

Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Sesuai Standar. Capaian kinerja indikator ini 93,75% (standar: 100%). Standar yang belum terpenuhi pada indikator ini, yaitu, Persentase Karyawan Mendapatkan Pelatihan 23,87% (standar: $\geq 60\%$). Setiap tahun RSUKT telah meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan untuk kebutuhan dan pengembangan layanan dan membentuk kelembagaan Unit

Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Staf RS untuk mengkoordinir dan memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan staf RSUKT.

Pelayanan Kamar Jenazah Sesuai Standar. Capaian 85,71%. Standar yang belum terpenuhi, yaitu, Ketersediaan Fasilitas Kamar Jenazah 72,73% (standar: 100%). Pelayanan Laundry Sesuai Standar. Capaian 85,71%. Standar yang belum terpenuhi, yaitu, Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Laundry 89,58% (standar: 100%). Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. Capaian kinerja indikator ini yaitu 100%.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Capaian kinerja indikator ini yaitu 83,33% (standar: 100%). Standar yang belum terpenuhi pada indikator ini yaitu Kepatuhan Penggunaan APD Saat Melaksanakan Tugas 93,06% (standar: 100%). Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan ini yaitu dengan pemantauan dan penilaian secara rutin oleh Komite PPI RS dan setiap Kepala Ruangan diberi tanggung jawab dalam mendidik dan meningkatkan kepatuhan petugas.

Pelayanan Keamanan Sesuai Standar. Capaian 66,67% (target: 100%). Standar yang belum terpenuhi pada indikator ini yaitu Pemenuhan Petugas Keamanan Bersertifikat. Masih terdapat petugas keamanan yang belum bersertifikat pelatihan satpam, secara persentase, capaiannya, 86,67%. Upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar ini yaitu dengan mereviu kontrak pengadaan tenaga keamanan dengan mewajibkan penyedia jasa keamanan, menugaskan petugas keamanan bersertifikat satpam.

Tabel 3.5
Program dan Kegiatan Pendukung
Pencapaian Persentase Capaian SPM RSU Kota Tarakan Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Rencana Aksi
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM RS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Pengadaan alkes bersumber dana APBD
					Pengadaan dan pemeliharaan alkes dan alat penunjang bersumber dana BLUD
					Monitoring Capaian SPM

Pada tahun 2024, RSUKT mendapat alokasi dana APBD dan DAK untuk pengadaan alat kesehatan pada instalasi rehabilitas medik, instalasi rawat inap dan

instalasi bedah sentral. Hal ini merupakan upaya dalam pencapaian standar input pada SPM pada ketiga unit layanan tersebut. RSUKT juga berkomitmen untuk mengevaluasi capaian SPM melalui pelaporan capaian SPM per unit per bulan dan kegiatan monitoring dan evaluasi capaian SPM pada agenda rapat pimpinan yang melibatkan unsur manajemen sampai level kepala instalasi dan kepala ruangan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan persentase capaian SPM RS per semester maupun evaluasi kinerja oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan di RSUKT per triwulan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan terlampir.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Anggaran untuk mendukung pencapaian SPM RS yaitu sebesar Rp3.834.863.843.00 untuk pengadaan alat kesehatan dan pengembangan RS. Tingkat penyerapan anggaran mencapai 92.40% namun capaian kinerja hanya 81.33%. Hal ini disebabkan karena untuk mendukung capaian SPM RS dibutuhkan anggaran yang besar dalam pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana. Selain itu, dari beberapa indikator yang belum mencapai target diantaranya adalah pemenuhan kompetensi petugas yang memerlukan *update* untuk pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan pada tiap unit.

Analisis penyebab peningkatan kinerja dan alternatif solusi yang telah dilakukan. Capaian SPM RSU Kota Tarakan tahun 2022 hingga 2024 belum mencapai target namun mengalami peningkatan. Adapun indikator yang belum mencapai target terutama pada indikator input seperti ketersediaan SDM baik jumlah maupun kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung layanan, dan alat kesehatan.

Hal ini disebabkan karena kebijakan dukungan anggaran yang terbatas baik APBD maupun APBN/DAK. RSUKT berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan per tahun agar dapat memenuhi kebutuhan operasional maupun belanja modal/investasi melalui diversifikasi layanan dan penambahan volume layanan melalui layanan pemeriksaan luar gedung, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan jasa layanan RS. Selain itu RSUKT mengoptimalkan kendali mutu dan kendali biaya agar dapat menerapkan efisiensi biaya namun tetap mempertahankan mutu layanan.

- 2) Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat. Indikator 2. Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024 yaitu sebesar 79,03%. Target yang ditetapkan sampai dengan akhir periode renstra 70%. Terjadi peningkatan capaian pada tahun 2024 dibanding capaian 2023 yaitu 75,05%. Tingkat capaian

pada indikator ini yaitu sebesar 100%. Terdapat 4 (empat) standar yang diukur dalam indikator kinerja ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pemenuhan Sumber Daya RS Berdasarkan Standar Penilaian
Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Persentase Pemenuhan SDM RS	Persentase Pemenuhan Sarana	Persentase Pemenuhan Prasarana	Persentase Pemenuhan Alat Kesehatan	Rata-Rata Kelengkapan Sumber Daya RS	Target 2024	Target Akhir Periode Renstra
2024	96.90	87.17	86.36	45.72	79.03	70.00	70.00
2023	95.61	79.88	74.42	50.32	75.05	70.00	70.00

Pemenuhan Sumber Daya Manusia RS. Capaian kinerja pada standar ini pada tahun 2024 yaitu sebesar 96,90%, meningkat dibanding capaian tahun 2023 yaitu sebesar 95,61%. Pada tahun 2024 pemenuhan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang diadakan melalui formasi PPPK, pengangkatan pegawai BLUD purna waktu dan pegawai BLUD paruh waktu. Untuk penyediaan jasa keamanan dan jasa kebersihan pengadaannya melalui alih daya oleh penyedia.

Pemenuhan Sarana RS. Capaian kinerja pada standar ini pada tahun 2024 yaitu sebesar 87,17%, meningkat dibanding capaian tahun 2023 yaitu sebesar 79,88%. Capaian kinerja Pemenuhan Prasarana RS, pada tahun 2024 sebesar 86,36%, meningkat dibanding capaian tahun 2023 yaitu sebesar 74,42%. Pemenuhan Alat Kesehatan RS pada tahun 2024 yaitu 45,72%, mengalami penurunan dibanding tahun 2023, 50,32%. Meningkatnya kinerja ini didasari oleh meningkatnya pendapatan RS dan adanya dukungan penyediaan melalui APBD dan DAK fisik.

Penurunan capaian pemenuhan alat kesehatan disebabkan karena dukungan dari DAK fisik sangat kecil dibanding dengan usulan yang diajukan. Beberapa peralatan yang direncanakan pembelian melalui e-katalog, tidak bisa dilakukan pembelian karena alat yang dibutuhkan tidak tersedia di e-katalog. Penurunan capaian pemenuhan alkes juga dipengaruhi oleh penambahan jenis layanan baru pada tahun 2024 diantaranya layanan gigi dan mata yang mempersyaratkan beberapa item alat baru yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi di RSUKT.

Tabel 3.7
Program dan Kegiatan Pendukung
Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar
RSU Kota Tarakan Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Rencana Aksi
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan SDM RS baik jenis dan jumlah maupun pengembangan kompetensinya
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Pengadaan meubelair RS dan Set Up Gedung Paviliun
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pembangunan/ Rehab Instalasi VK dan IGD, Taman Area Parkir, dan Rehab Masjid RSUKT
					Pemeliharaan Bangunan RS
					Pemenuhan obat, BMHP dan Logistik RS

Pada tahun 2024, RSUKT melalui dana APBD maupun dana BLUD berupaya untuk memenuhi standar ketenagaan baik tenaga medis (dokter dan dokter gigi) maupun tenaga teknis lainnya. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan sumber daya yaitu keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan mengingat dana yang dibutuhkan cukup besar. Disisi lain, RSUKT sebagai RS yang tumbuh dan berkembang harus senantiasa mengupayakan diversifikasi layanan untuk memenuhi permintaan pasar. Berbagai jenis layanan diantaranya layanan bedah mulut, prostodontia, layanan kesehatan mata harus disertai dengan pemenuhan tenaga baik dokter spesialis maupun tenaga perawat baik jumlah maupun kompetensinya maupun memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana seperti ruangan pelayanan.

Dalam hal pemenuhan tenaga khususnya dokter dan dokter spesialis, RSUKT telah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dan Universitas Bosowa Makassar untuk dapat mensupport ketersediaan tenaga dokter spesialis. RSUKT

juga telah menjadi wahana dokter internship sehingga pada tahun 2024 mendapatkan bantuan tenaga dokter umum.

Pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya, RSUKT bekerja sama dengan berbagai RS diantaranya RS. Mata YAP, Yogyakarta, RS Dr. Moewardi Solo, RS Universitas Hasanuddin Makassar, RS UGM Yogyakarta, dan RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan. Upaya tersebut dapat mengungkit pemenuhan SDM sesuai dengan standar pelayanan. Pada tahun 2024 RSUKT juga telah membentuk Unit Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi, unit ini yang akan mengkoordinir pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik yang diadakan secara mandiri maupun bekerja sama dan pengiriman peserta diklat.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Sumber Daya Pemenuhan Sumber Daya
RSUKT Sesuai Standar Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar	100.00%	81.29%	Efisien

Tingkat capaian kinerja pemenuhan sumber daya RS sesuai standar pada tahun 2024 mencapai target 100% sedangkan tingkat penyerapan anggaran yaitu 81.29% dengan tingkat efisiensi: efisien. Pada tahun 2024, untuk mendukung pencapaian pemenuhan sumber daya RS baik SDM, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang sesuai dengan standar, RSUKT telah melakukan perekrutan tenaga baik tenaga medis (dokter dan dokter spesialis), pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan baik melalui dana APBD maupun dana BLUD. RSU Kota Tarakan juga telah menambah jam layanan poliklinik rawat jalan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan di rumah sakit. Pada tahun 2024 RSUKT juga mendapatkan pendampingan dari RS Unhas dalam melakukan kendali mutu, kendali biaya pada operasional layanan RS. Dokumentasi terlampir. Hal yang masih menjadi tugas RSUKT yaitu menindaklanjuti rekomendasi hasil pendampingan dalam pelaksanaan rutinitas operasional RSUKT.

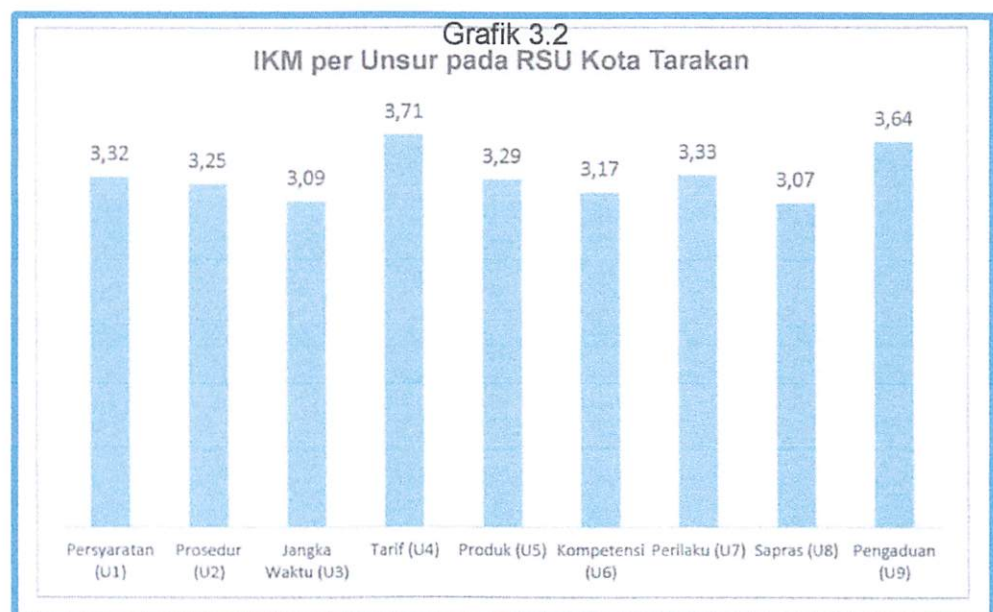
- 3) Sasaran 2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik. Indikator: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2024 yaitu 82,17. Target yang ditetapkan sampai dengan akhir periode renstra 83. Terjadi penurunan capaian pada tahun 2024 dibanding capaian 2023 yaitu 82,45. Tingkat capaian pada indikator ini yaitu sebesar 99%.

Tabel 3.9
Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat RSUKT Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Periode
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82.45	83	82.17	99.00%	83

Adapun perolehan unsur yang masih rendah menurut hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat semester II, yaitu pada unsur: Kualitas Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,07, Selanjutnya Kecepatan Pelayanan yang mendapatkan 3,09 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Kompetensi Petugas termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 3.17. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Kesesuaian/Kewajaran Biaya mendapatkan nilai tertinggi 3,71 dari unsur layanan, dan Penanganan Pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3,64 serta Prilaku Petugas mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,33. Berikut grafik capaian kepuasan masyarakat per unsur.



Tabel 3.10
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
RSUKT Tahun 2024

No.	Unit Pelayanan	Jumlah Kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien yang di survei	Jumlah Responden	Nilai IKM	Predikat IKM
1	Loket	3,23	6	80.67	B
2	IGD	3,25	69	81.34	B
3	MCU	3,26	11	81.5	B
4	Poli Anak	3,39	9	84.64	B
5	Poli Kandungan	3,21	9	80.36	B
6	Poli Penyakit Dalam	3,23	24	80.67	B
7	Poli Bedah	3,38	16	84.39	B
8	Poli Jantung	3,24	7	80.93	B
9	Poli Saraf	3,45	11	86.25	B
10	Poli Urologi	3,23	5	80.85	B
11	Mata	3,47	8	86.63	B
12	Gigi dan Mulut	3,09	20	77.14	B
13	Rehabilitasi Medik	3,39	15	84.7	B
14	Kamar Bersalin	3,63	4	90.75	A
15	IBS	3,36	9	84.03	B
16	Radiologi	3,33	29	83.26	B
17	Laboratorium	3,27	53	81.83	B
18	Farmasi	3,32	6	82.96	B
19	Rawat Inap Paviliun	3,63	4	90.75	A
20	Rawat Inap Angsana	3,15	10	78.65	B
21	Rawat Inap Cemara	3,15	9	78.83	B
22	Rawat Inap Cendana	3,23	10	80.85	B
23	Rawat Inap Damar	3,15	9	78.83	B
24	Gizi	3,23	6	80.67	B
25	Ambulance	3,26	6	81.58	B
26	ICU dan HCU	3,36	7	84.07	B
27	Pelayanan Keamanan	3,41	6	85.25	B
28	Pemulasaran Jenazah	3,25	6	81.13	B
Total / Rata-rata			736	82,17	B

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada semester I dan semester II 2024. Pada semester II terdapat unit dengan perolehan nilai IKM masih rendah, yaitu: Poli Gigi dan Mulut: 77,14; Ruang Rawat Inap Angsana: 78,65; Ruang Rawat Inap Damar dan Cemara

masing-masing memperoleh nilai: 78, 83. Unit dengan perolehan nilai tertinggi, yaitu: Instalasi Kamar Bersalin: 90,75; Rawat Inap Paviliun: 90,75; dan Poli Kesehatan Mata: 86,63.



Trend capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di RSUKT menurun. Hal ini tentunya menjadi salah satu tantangan bagi RSUKT nilai indeks kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator kinerja RS.

Tabel 3.11
Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Nilai IKM RSUKT Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Rencana Aksi
Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di RS	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Publikasi Hasil Survey IKM
				Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
				Penanganan Komplain Layanan RS
				Monev dan penyusunan laporan pemenuhan kewajiban RS
				Monev dan penyusunan laporan pemenuhan hak Pasien di RS

Salah satu upaya RSUKT dalam meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat, yaitu dengan melakukan forum konsultasi publik. Forum ini menghadirkan banyak unsur seperti ombudsman, mitra kerja sama, pimpinan FKTP, organisasi profesi kesehatan, tokoh masyarakat, lintas sektor, media, pimpinan universitas/fakultas, dan lain-lain. Forum ini merumuskan dan menyimpulkan kritik, masukan dan usulan yang harus ditindaklanjuti RSUKT.

Bebagai upaya yang dilaksanakan pada tahun 2024 baik pelaksanaan survei kepuasan, pelaksanaan kegiatan forum konsultasi publik, penanganan keluhan/komplain layanan maupun kegiatan lainnya tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan penurunan nilai, yang memberikan gambaran penurunan kepuasan terhadap layanan di RSUKT. Penurunan indeks kepuasan masyarakat dalam 2 (dua) tahun terakhir, menjadi catatan bahwa, secara internal RSUKT harus melihat kembali kesesuaian metodologi survei dengan kaidah yang berlaku, serta melibatkan SPI RS dalam melakukan audit pelaksanaan survei.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Sumber Daya Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
RSU Kota Tarakan Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	99.00%	92.86%	Efisien

Tingkat Capaian kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 99.00% sedangkan tingkat penyerapan anggaran yaitu 92.86%. Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan di RSUKT yaitu pengelolaan pengaduan maupun harapan masyarakat terhadap kebutuhan layanan di RSUKT. Keluhan pasien mengenai waktu tunggu layanan akan diupayakan dengan pengembangan SIMRS terintegrasi dan mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan mobile JKN.

- 4) Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS. Indikator 1: Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS.

Pengukuran kinerja RS dapat dilakukan dengan berbagai indikator kinerja, seperti: Indikator kinerja keuangan, Indikator kinerja pelayanan, Indikator mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Rumah sakit perlu mengukur capaian kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan performa RS.

Tabel 3.13
Capaian Nilai Kinerja BLUD RSUKT Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Periode	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS	90	83	83.19	100.00%	83	100.00%

Nilai evaluasi kinerja BLUD RSUKT pada tahun 2024 mencapai target dengan nilai capaian 83.19 (SANGAT BAIK). Pengukuran terhadap capaian kinerja BLUD RS dilakukan sejak tahun 2021. Pada tahun 2023 ditetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Indikator Penilaian Tata Kelola dan Kinerja Pada BLUD RSU Kota Tarakan. Regulasi ini menetapkan aspek dan indikator yang menjadi ukuran kinerja pengelolaan BLUD RSU Kota Tarakan. Berikut rekapitulasi capaian kinerja BLUD RSUKT Tahun 2021-2024.

Tabel 3.14
Capaian Kinerja BLUD RSUKT Tahun 2021 s.d Tahun 2024

No	Perspektif Yang Dinilai	Bobot	Skor 2021	Skor 2022	Skor 2023	Skor 2024	Capaian 2024
A PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN							
1	Kecukupan SDM	8	4.78	6.00	7.54	7.47	93.36%
2	Pelatihan 20 Jam Per Pegawai	5	0.77	2.50	3.36	2.01	40.20%
3	Kecukupan Sarana Medis	8	5.51	8.00	4.03	3.66	45.72%
4	Pengembangan SIM RS	5	4.00	4.00	4.09	4.09	81.82%
5	Kenaikan Pendapatan RSUD per Pegawai	4	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
	Sub Total Pertumbuhan dan Pembelajaran	30	19.15	20.50	23.02	21.23	72.22%
B LAYANAN INTERNAL							
1	Waktu Tunggu Laboratorium Kritis	5	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%

No	Perspektif Yang Dinilai	Bobot	Skor 2021	Skor 2022	Skor 2023	Skor 2024	Capaian 2024
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	3	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
3	Waktu Tanggap Darurat IGD	5	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
4	Penundaan Operasi Efektif	3	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
5	Net Death Rate (NDR)	4	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%
	Sub Total Proses Layanan Internal	20	20	20	20	20.00	100%
C	PELANGGAN						
1	Indeks Kepuasan Pelanggan	9	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00%
2	Penanganan Komplain	8	8.00	8.00	8.00	8.00	100.00%
3	Rujukan Keluar pasien Rawat Inap	5	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
4	Retensi Pelanggan rawat Jalan	5	4.35	4.00	4.99	4.97	99.31%
5	Pasien Pulang Paksa	3	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
	Sub Total Pelanggan	30	29.35	29.00	29.99	29.97	99.86%
D	KEUANGAN						
1	Rasio Kas	5	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%
2	Cost Recovery Rate (CRR)	5	5.00	4.00	5.00	5.00	100.00%
3	Profit Margin	3	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	2	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%
5	Pertumbuhan Pendapatan	5	5.00	0.00	5.00	5.00	100.00%
	Sub Total Keuangan	20	20.00	11.00	17.00	12.00	60%
	TOTAL	100.00	88.50	80.50	90.00	83.19	83.19

Hasil penilaian terhadap kinerja di RSUKT baik oleh Dewan Pengawas dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terhadap layanan di RSUKT menunjukkan hasil yang baik. RSUKT sebagai unit organisasi yang menerapkan PPK BLUD berkomitmen untuk mengevaluasi kinerja layanan. Hal ini didukung oleh peran Dewan Pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Selain itu, hal yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja BLUD menjadi bagian yang dituangkan dalam perjanjian kinerja direktur sampai pada level kepala bidang/bagian maupun kepala seksi/subbagian.

Tabel 3.15
Program dan Kegiatan Pendukung Nilai Evaluasi Kinerja BLUD Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Rencana Aksi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai Kinerja BLUD RS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Monev Capaian Kinerja RS
				Pembinaan dan Pengawasan Oleh Dewas
				Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja RS oleh Dewas ke Pemilik/Wali Kota

RSUKT berkomitmen dalam meningkatkan kinerja baik dari segi kinerja layanan maupun kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi kinerja RS oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Utara maupun oleh Dewan Pengawas yang secara rutin melakukan pengawasan yang menunjukkan hasil kinerja dengan predikat SANGAT BAIK sejak tahun 2021. Dokumentasi terlampir.

Analisis efisiensi sumber daya terhadap capaian kinerja indikator ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi Sumber Daya Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUKT Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS	100.00%	89.40%	Efisien

Tingkat Capaian kinerja nilai evaluasi kinerja BLUD pada RSUKT pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan tingkat penyerapan anggaran yaitu 89.40%. Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja ini, yaitu:

- Seluruh indikator dalam penilaian kinerja BLUD menjadi bagian dari indikator kinerja yang dibagi secara berjenjang sampai dengan tingkat unit/ruangan dan tingkat staf untuk di level manajemen. Sehingga hal ini menjadi dasar bagi

seluruh staf dalam pelaksanaan tugas rutin sesuai kompetensi/kewenangan yang diberikan.

- RSUKT melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kinerja BLUD yang diampu oleh masing-masing bidang sampai dengan unit/ruangan dan staf. Aktivitas ini menjadi alat kontrol pimpinan dalam memetakan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki. Sebagai contoh yaitu upaya membuka layanan PONEK dengan melatih SDM RS dari lintas profesi. Pendistribusian tambahan tenaga lintas unit/ruangan apabila terdapat permintaan layanan yang meningkat.
- Pimpinan RSUKT terlibat langsung dalam memantau kondisi keuangan RSUKT secara rutin. Pemantauan dilakukan dengan melihat pos-pos pengeluaran dengan pendapatan yang masuk. Sehingga dari aktivitas ini, pimpinan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan BLUD.

Dokumentasi terhadap seluruh aktivitas di atas, terlampir dalam laporan ini.

5) Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS. Indikator 2: Nilai SAKIP RS.

Pada tahun 2024, Tim SAKIP Kota Tarakan telah melakukan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja tahun 2023. Rincian perolehan nilai SAKIP RSUKT sebagai berikut:

Tabel 3.17
Hasil Penilaian SAKIP RSUKT Tahun 2024

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Capaian	Nilai SAKIP 2024	Nilai SAKIP 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	18,60	62,66 (Baik)	-
2	Pengukuran Kinerja	30	24,00		
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80		
4	Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal	25	9,25		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian SAKIP RS untuk tahun perdana penilaian secara mandiri masih jauh mendekati bobot per aspek. Tim Penilai memberikan interpretasi dari nilai SAKIP B yang diperoleh yaitu: *Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada sepertiga unit kerja, khususnya pada unit kerja utama,*

serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Berikut rekomendasi hasil penilaian dan tindak lanjut yang telah dilakukan RSUKT pada tahun 2024:

Tabel 3.18
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Penilaian SAKIP RSUKT Tahun 2024

Rekomendasi	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan
Perencanaan Kinerja: Agar Tim Penyusun SAKIP RSUKT dan RSUKT segera menyusun dan membuat dokumen sebagai berikut: 1. Rencana aksi atas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung indikator sasaran. 2. Diagram cascading yang menggambarkan hubungan keterkaitan dan keselarasan kinerja antar level jabatan. 3. Diagram crosscutting yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang dan tugas fungsi yang saling terkait antar level bidang.	1. Penyusunan dan pengumpulan Rencana Kerja Tahunan seluruh bidang untuk T.A 2024 dengan menyesuaikan pada APBD-P T.A 2024 (Oktober 2024) 2. Pendokumentasian penyusunan cascading T.A 2024 yang telah dilaksanakan 3. Tim SAKIP RSUKT yang dibentuk berkonsultasi dengan Bagian Organisasi dan Dinas Kesehatan perihal penyusunan diagram crosscutting RSU Kota Tarakan
Evaluasi Pengukuran Kinerja: 1. Agar pengukuran kinerja tetap dilaksanakan secara berjenjang sampai ke tingkatan jenjang JFT ahli muda/sub koordinator bila pengampu jabatan tersebut memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab kinerja yang selevel dengan pengampu jabatan Eselon IV. 2. Perlu dilakukan pengukuran kinerja atas aktivitas berkala yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang diukur melalui bukti (monev rencana aksi kinerja secara berkala/triwulan)	1. Penyusunan dan pendokumentasian jadwal monev kinerja layanan dan kinerja keuangan RSUKT untuk T.A 2024; 2. Mendokumentasikan RTL monev kinerja (dokumentasi terlampir); 3. Memfasilitasi pelaksanaan dialog kinerja per bidang pada triwulan IV dan triwulan I 2025.
Laporan Kinerja yang akan datang RSUKT agar dapat menyajikan: a. Analisis perbandingan antara realisasi capaian tahun 2024 dengan target kinerja RPJMD/renstra; b. Analisa perbandingan antara realisasi capaian 2024 dengan target nasional; dan	1. Menjadwalkan reviu capaian kinerja RSU Kota Tarakan T.A 2024 dengan Bappeda dan Litbang Kota Tarakan dan Dinas Kesehatan Kota Tarakan terkait pencapaian kinerja RPJMD/Renstra dan Target Nasional; 2. Menyajikan analisis capaian kinerja RSUKT T.A 2024 dengan target renstra dan capaian kinerja unit kerja yang setara;

Rekomendasi	Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Yang Telah Dilakukan
c. Tindak lanjut perbaikan atas hasil rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.	3. Menyampaikan dan menyajikan tindak lanjut perbaikan atas hasil rekomendasi pada laporan LAKIP 2025.
RSUKT agar melaksanakan: a. Monev rencana aksi triwulan secara terjadwal; b. Monev akuntabilitas kinerja internal serta evaluasi internal terkait pencapaian indikator sasaran, program/kegiatan sesuai PK dan IKU.	1. Telah disusun dan dilaksanakan monev rencana aksi triwulan dalam dokumen Rencana Aksi Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja T.A 2024; 2. Telah dilakukan monev pencapaian indikator sasaran. program/kegiatan sesuai PK dan IKU 3. Telah dilakukan pembahasan dan fasilitasi penyusunan sasaran kinerja utama, sasaran kinerja program sampai dengan sasaran kinerja kegiatan/sub kegiatan di semua bidang. Hasil pembahasan ini menjadi dasar dalam menyusun perjanjian kinerja T.A 2025.

Berdasarkan penjelasan dan penyajian data pada tabel 3.18 di atas, dapat dilihat bahwa RSUKT telah berupaya melakukan semua rekomendasi dari tim penilai per aspek yang menjadi dasar penilaian. Upaya perbaikan tersebut diantaranya dengan mengumpulkan dan mendokumentasikan rekomendasi yang sebenarnya telah dikerjakan dan melaksanakan rekomendasi yang belum dijalankan untuk pencapaian kinerja T.A 2024 maupun untuk penyusunan kinerja T.A 2025.

Capaian Nilai SAKIP RSUKT pada tahun pertama penilaian masih belum sesuai dengan target dan juga jika dibandingkan dengan capaian Nilai SAKIP RS dari RS daerah yang setipe dengan RSUKT, yaitu, hasil penilaian SAKIP RS pada RSUD Kota Yogyakarta, dengan perolehan nilai pada tahun 2022 84,13 (predikat: A) dan tahun 2023 meningkat menjadi 84,13 (predikat: A).

Analisis efisiensi sumber daya terhadap capaian kinerja indikator ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.19
Analisis Efisiensi Nilai SAKIP RSUKT Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai SAKIP RS	89.51%	50.90	Efisien

Tingkat Capaian kinerja nilai SAKIP pada RSUKT pada tahun 2024 yaitu 89.51% sedangkan tingkat penyerapan anggaran yaitu 50.90%. pada tahun 2023, pelaksanaan kegiatan terkait perencanaan sampai dengan penilaian SAKIP belum terdokumentasi dengan baik.

Pada tahun 2024, RSUKT membentuk Tim SAKIP secara internal yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur, serta meningkatkan kapasitas Tim SAKIP melalui keikutsertaan Diklat SAKIP Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh UGM, Yogyakarta dan Bimtek SAKIP Tingkat Kota Tarakan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tarakan. Meningkatnya kapasitas Tim SAKIP RSUKT diharapkan dapat berkontribusi pada pengelolaan kinerja organisasi dan kinerja individu di RSUKT agar semakin berdampak signifikan.

6) Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS. Indikator 1: Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Resiko RS.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Utara pada tahun 2024. Berdasarkan kertas kerja hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko BLUD RSU Kota Tarakan
Tahun 2024

NO	ASPEK/INDIKATOR	BOBOT	SKOR	NILAI
I	PERENCANAAN			2,0000
1	Kualitas Perencanaan	40,00%	5,00	2,0000
II	KAPABILITAS			1,0000
2	Kepemimpinan	5,00%	3,25	0,1625
3	Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	4,00	0,2000
4	Sumber Daya Manusia	5,00%	2,00	0,1000
5	Kemitraan	2,50%	4,00	0,1000
6	Proses Manajemen Risiko	12,50%	3,50	0,4375
III	HASIL			0,1875
7	Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	1,00	0,1875
8	Outcomes	11,25%	-	-
	JUMLAH	100,00%		3,1875
	TINGKAT MATURITAS	Terdefinisi		

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat maturitas pengelolaan manajemen resiko di RSUKT diukur dari 3 aspek yaitu perencanaan, kapabilitas dan hasil. Aspek perencanaan. Parameter yang dinilai pada aspek ini yaitu:

- 1) Keterkaitan Antara Sasaran BLUD dengan Sasaran Strategis Pemda. Nilai yang diperoleh 0,6
- 2) Ketepatan Penetapan Strategis. Nilai yang diperoleh 0,6

3) Ketepatan Penetapan Indikator Kinerja. Nilai yang diperoleh 0,4

4) Penetapan Target Kinerja. Nilai yang diperoleh: 0,4

Parameter yang dinilai pada aspek perencanaan telah dipenuhi seluruhnya oleh RSUKT. Pemenuhan skor 5. Aspek Kapabilitas. Parameter yang dinilai pada aspek ini yaitu:

- 1) Kepemimpinan, meliputi: pimpinan BLUD mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko, pimpinan BLUD menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan, pimpinan BLUD mendorong penerapan manajemen risiko, melalui penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja dan pimpinan BLUD membangun sistem pengaduan, secara keseluruhan pemenuhan skor 4 dan nilai yang diperoleh 0,1.
- 2) Kebijakan Manajemen Risiko. BLUD telah memiliki kebijakan manajemen risiko. Pemenuhan skor 4 dan nilai 0,2.
- 3) Sumber Daya Manusia. Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko dan Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko. Pemenuhan skor secara keseluruhan 2 dan nilai 0,1.
- 4) Kemitraan. Parameter yang dinilai yaitu BLUD telah mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan. Pemenuhan skor pada aspek ini 4 dengan nilai 0,1.
- 5) Proses Manajemen Risiko. Secara keseluruhan pemenuhan skor pada parameter ini yaitu 3,5 dengan perolehan nilai 0,4. Parameter yang dinilai yaitu:
 - a. risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko;
 - b. proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis BLUD;
 - c. seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya;
 - d. BLUD telah menentukan prioritas risiko;
 - e. BLUD telah menentukan rencana tindak pengendalian, strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan;
 - f. register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan dengan pihak terkait;
 - g. proses manajemen risiko telah direviu;
 - h. pemantauan monitoring risiko telah dilakukan;
 - i. dan terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko.

Aspek Hasil. Parameter yang dinilai pada aspek ini yaitu Aktivitas Penanganan Risiko. BLUD telah menentukan penanganan resiko. Pemenuhan skor pada aspek ini yaitu 1 dengan nilai 0,1. Parameter kedua yaitu *outcomes*. Adanya implementasi tindak pengendalian. Pemenuhan skor 0 dan perolehan nilai 0.

Berdasarkan hasil penilaian di atas dapat dilihat bahwa terdapat aspek yang belum dipenuhi dalam aktivitas pengelolaan risiko di RS, terutama pengelolaan risiko pada sektor strategis yaitu di tingkat manajemen. Hal ini yang menjadi evaluasi bagi manajemen RSUKT untuk mengintegrasikan manajemen risiko sektor strategis pada aktivitas pencapaian tujuan dan sasaran renstra RS.

Tabel 3.21
Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko RSU Kota Tarakan
Tahun 2023 dan 2024

NO	ASPEK/INDIKATOR	BOBOT	SKOR 2023	SKOR 2024	NILAI 2023	NILAI 2024
I	PERENCANAAN				20,000	20,000
1	Kualitas Perencanaan	40,00%	5,00	5,00	20,000	20,000
II	KAPABILITAS				10,000	10,000
2	Kepemimpinan	5,00%	3,25	3,25	0,1625	0,1625
3	Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	4,00	4,00	0,2000	0,2000
4	Sumber Daya Manusia	5,00%	2,00	2,00	0,1000	0,1000
5	Kemitraan	2,50%	4,00	4,00	0,1000	0,1000
6	Proses Manajemen Risiko	12,50%	3,50	3,50	0,4375	0,4375
III	HASIL				0,1875	0,1875
7	Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	1,00	1,00	0,1875	0,1875
8	Outcomes	11,25%	-	-	-	-
	JUMLAH	100,00%			31,875	31,875
	TINGKAT MATURITAS				Terdefinisi	Terdefinisi

Nilai Maturitas Pengelolaan Risiko RSUKT pada tahun 2023 dan 2024 sama dengan nilai 31,875 atau tingkat maturitas Terdefinisi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen risiko di RSUKT dapat tetap konsisten dilaksanakan melalui peran dari komite mutu yang melakukan penyusunan pedoman pengelolaan manajemen risiko sampai pada penilaian risiko di RS.

Tabel 3.22
Analisis Efisiensi Sumber Daya
Pada Pencapaian Tingkat Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko
RSUKT Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Tingkat Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko RS	100.00%	97.50%	Efisien

Tingkat Capaian kinerja nilai maturitas pengelolaan risiko pada RSUKT pada tahun 2024 yaitu 100% sedangkan tingkat penyerapan anggaran yaitu 97.50%. Kinerja ini didukung dengan teorganisirnya sumber daya pengelola manajemen risiko yang diampu oleh Komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Sub Komite Manajemen Risiko. Personil dari tim mutu pada tahun 2023 aktif mengkoordinir pemetaan risiko pada kegiatan strategis RS yang dikerjakan oleh manajemen. Sehingga pada tahun 2024 seluruh bidang telah memiliki kegiatan strategis yang harus dilakukan pengendalian resiko.

Hal yang menjadi tugas RSUKT ke depan yaitu pengelolaan risiko sektor strategis menjadi bagian dari penyusunan rencana strategis RS, target kinerja utama. Masing-masing pemilik risiko strategis melaksanakan rencana tindak pengendalian setiap kegiatan. Selain itu penguatan pada sumber daya manusia yaitu meningkatkan kompetensi staf manajemen pada isu manajemen risiko.

Tabel 3.23
Program dan Kegiatan Pendukung Nilai SAKIP
RSUKT Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Rencana Aksi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Resiko RS	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko RS
				Monitoring Pelaksanaan Manajemen Risiko di RS

RSUKT mendapatkan pendampingan dari Perwakilan BPKP dalam penyusunan dokumen Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko yang memuat tentang register risiko baik risiko klinis maupun risiko yang terkait dengan sasaran strategis. Kegiatan tersebut menjadi titik awal bagi RSUKT dalam melakukan pembenahan terhadap pengelolaan manajemen risiko di RS.

B. Realisasi Anggaran.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian		Pagu	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM RS	100%	81.33%	81.33%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3,834,863,843.00	3,543,429,121.00	92.40
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar	70%	79.03%	100.00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17,637,036,259.00	14,337,290,412.00	81.29
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	83	82.17	99.00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	186,100,000.00	172,808,401.00	92.86
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja RS	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS	83	83.19	100.00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59,944,089,957.00	53,590,748,083.42	89.40
		Nilai SAKIP RS	70	62.66	89.51%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39,000,000.00	19,850,000.00	50.90
		Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Resiko RS	3 (Terdefinisi)	3 (Terdefinisi)	100.00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,000,000.00	3,900,000.00	97.50
Total					93.97%		81,645,090,059.00	71,668,026,017.42	87.78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan capaian kinerja utama dan analisis yang telah dituangkan dalam Bab III, disimpulkan bahwa:

- 1) Kinerja utama yang mengalami peningkatan dan sesuai/melampaui target yaitu:
 - Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit. Capaian 79,03%, target tahun akhir periode renstra 70%. Kesimpulan: efisien.
 - Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS. Capaian 83,19. Target 83. Kesimpulan: efisien.
 - Nilai Maturitas Manajemen Risiko. Capaian 3.00 dengan predikat terdefinisi.
- 2) Kinerja utama yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya tetapi belum memenuhi target pada tahun terakhir periode renstra RS, yaitu Capaian SPM RS 81,33% (target 100%).
- 3) Kinerja Utama yang belum sesuai target dan masih tahun pertama pengukuran, yaitu, Nilai SAKIP RS, 62,66 (target 70).
- 4) Kinerja Utama yang mengalami penurunan dan belum sesuai target yaitu, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82,45 (target: 83).

B. Rekomendasi Upaya Perbaikan.

Sesuai dengan kesimpulan di atas, rekomendasi upaya perbaikan yang telah/akan dilakukan oleh RSUKT yaitu:

- 1) Indikator Persentase Capaian SPM RS : pemenuhan peralatan dan sarana prasarana pendukung pelayanan serta perbaikan pada proses pelayanan sesuai dengan standar, dan kepatuhan dalam menjalankan SOP.
- 2) Indikator Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS sesuai Standar : peningkatan pemenuhan alat kesehatan dan alat penunjang layanan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- 3) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : perbaikan pada pengelolaan survey kepuasan masyarakat dan pengelolaan penanganan pengaduan/komplain.
- 4) Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RS : komitmen seluruh pihak dalam meningkatkan capaian kinerja BLUD baik kinerja keuangan maupun kinerja layanan terutama pada indikator yang belum mencapai target antara lain: peningkatan kompetensi petugas melalui program diklat, penambahan modul SIMRS, dan peningkatan pendapatan RS.
- 5) Nilai SAKIP RS

- telah ditetapkan Tim SAKIP RS melalui SK direktur. Tim SAKIP RS bertugas mengkoordinir pengelolaan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan.
 - peningkatan kompetensi Tim SAKIP RS. Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) orang anggota Tim SAKIP RS telah mengikuti Diklat SAKIP dan 2 (dua) orang anggota Tim SAKIP RS telah mengikuti Bimtek SAKIP RS yang diadakan oleh Pemerintah Kota Tarakan.
 - mengusulkan untuk dilakukan audit internal oleh SPI terhadap capaian kinerja utama yang menurun dan yang belum memenuhi target.
 - mereviu pohon kinerja yang telah disusun dengan mengidentifikasi kinerja yang belum terakomodir. Pohon kinerja yang telah direviu menjadi dasar dalam penyusunan *cascading* dan perjanjian kinerja.
 - memperluas area penandatanganan perjanjian kinerja sampai dengan tingkat Kepala Ruangan dan staf.
 - mempercepat penyusunan rencana aksi tahun yang akan berjalan.
 - melakukan evaluasi kinerja secara rutin pada tahun 2025.
- 6) Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko : Peningkatan peran komite mutu melalui sub komite manajemen risiko dalam melakukan pengelolaan risiko area manajerial dan klinis agar dapat meningkatkan nilai maturitas pengelolaan risiko di RSUKT.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Jalan Aki Babu RT. 01 No. 170 Tarakan 77111
Telepon (0551) 3809788/+62 823-5230-1751; Fax: (0551) -
Laman : <http://dinkes.tarakankota.go.id/rsukt> Pos-El : rsukotatarakan@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
PEJABAT ESELON III
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. JOKO HARYANTO, M.M.
Jabatan : DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : dr. DEVI IKA INDRIARTI, M.Kes
Jabatan : KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

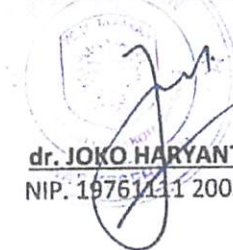
Tarakan, 26 September 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan



dr. DEVI IKA INDRIARTI, M.Kes
NIP. 19700517200212 2 006

Pihak Pertama,
Direktur RSU Kota Tarakan



dr. JOKO HARYANTO, M.M.
NIP. 19761111 200502 1 002



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Jalan Aki Babu RT. 01 No. 170 Tarakan 77111
Telepon (0551) 3809788/+62 823-5230-1751; Fax: (0551) -
Laman : <http://dinkes.tarakankota.go.id/rsukt> Pos-El : rsukotatarakan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
(dr. JOKO HARYANTO, M.M. / DIREKTUR RSUKT)
TAHUN 2024

NO.	SASARAN	NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	100%
		2.	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70%
2.	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di RS	83
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	4.	Nilai Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	83
		5.	Nilai Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	70-80 (Baik)
		6.	Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko Rumah Sakit	3,0 (Terdefinisi)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
I.	Program Prioritas		
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 3,834,863,843	APBD, DAU, DAK
II.	Program Pendukung		
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.77,810,226,216	APBD, DAU, BLUD
Total DPA Tahun 2024		Rp.81,645,090,059	

Tarakan, 26 September 2024

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Kesehatan


dr. DEVIKA INDIRIARTI, M.Kes
NIP. 19700517 200212 2 006

Pihak Pertama,
Direktur RSU Kota Tarakan


dr. JOKO HARYANTO, M.M.
NIP. 19761111 200502 1 002

BerAKHLAK #bangga
melayani
banasa

A. Dokumentasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal RSUKT



B. Benchmarking Pengelolaan Sumber Daya RS (SDM RS, Pengadaan Logistik, Mutu dan Keselamatan Pasien)





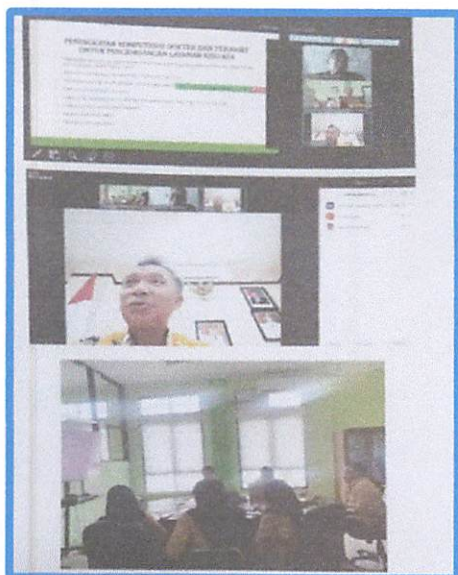
C. Pendampingan Kendali Mutu Kendali Biaya dari RS Unhas



D. Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dan Menjaring Kebutuhan Masyarakat.



E. Konsultasi dan Rapat Rutin RSUKT dengan Dewan Pengawas





PEMERINTAH KOTA TARAKAN
SERTIFIKAT

800.2.2/07/054-IV/BKPSDM/2024

DIBERIKAN KEPADA
HASMAH, S.E.

Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

Atas partisipasinya sebagai

Peserta

**COACHING CLINIC SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

Selama 12 JP

Tarakan, 20-21 November 2024

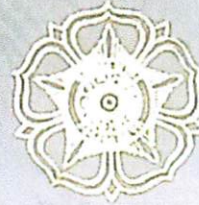
KEPALA BKPSDM



Untung Prayitno, S.E.
UNTUNG PRAYITNO, S.E.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196411191993031003

MATERI KEGIATAN
COACHING CLINIC SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

NO	MATERI	JP	PEMATERI
1	Kebijakan Peningkatan SAKIP	2	Alif Fajar Sidiq dan Endy Christian Mahardika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2	Penguatan Implementasi SAKIP Kota Tarakan	2	
3	Pendampingan Penyusunan Pohon Kinerja berdasarkan PermenPANRB 89 Tahun 2021	4	
4	Pendampingan Penyusunan Indikator Kinerja yang Smart dan Cukup	4	



UNIVERSITAS GADJAH MADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sertifikat

Diberikan Kepada:

Nama : Ade Saktiawan Amirullah, S.KM., M.H.
Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang, 01 Oktober 1985
NIP : 19851001 201001 1 003
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan
Instansi : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
Instansi Asal/Pemda : Kota Tarakan

Sebagai:

Peserta

Dalam **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)**

Diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM

yang meliputi 26 Jam Pelajaran, dengan predikat sangat memuaskan/~~memuaskan~~/~~kurang memuaskan~~

Yogyakarta, 5 - 8 November 2024

Dekan,

Dr. Wawan Mas'udi, S.IP., M.P.A.
NIP. 19770517 200212 1 003



Direktur Pusat Pengembangan Kapasitas
dan Kerjasama,

Prof. Dr. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.
NIP. 19740914 200212 1 002

DAFTAR MATA DIKLAT

No	Materi	Jumlah
1.	Pretest dan <i>Building Learning Commitment</i> (BLC)	1
2.	Implikasi Prinsip Governance	2
3.	Penjenjangan dan Pohon Kinerja	2
4.	Simulasi dan Presentasi: Pohon Kinerja	1
5.	Perencanaan Kinerja	2
6.	Simulasi dan Presentasi : Perencanaan Kinerja	1
7.	Perjanjian Kinerja	2
8.	Simulasi dan Presentasi: Perjanjian Kinerja	1
9.	Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja	2
10.	Simulasi dan Presentasi: Pengukuran Kinerja dan Analisis Pencapaian Kinerja	1
11.	Sistematika dan Proses Pelaporan Kinerja	2
12.	Belajar Praktik Baik Akuntabilitas Kinerja DIY	2
13.	Evaluasi AKIP	2
14.	Presentasi dan Pembahasan SAKIP Utuh	4
15.	Review Akhir	1
Total Jam Mata Diklat		26

Keterangan

1 Jam Pelajaran = 45 Menit

Yogyakarta, 08 November 2024

Direktur Pusat Pengembangan Kapasitas

dan Kerjasama,



Prof. Dr. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

NIP. 19740914 200212 1 002

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DESEMBER

Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02
Program : 1.02.01
Kegiatan : 1.02.01.2.02
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.01

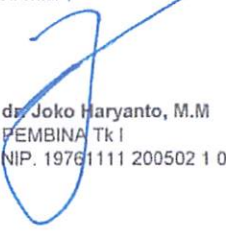
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
NUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/6)x100 (%)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH/REALISASI FISIK & KEUANGAN				11.647.658.259,00	11.647.658.259,00	100,00	96,60		10.579.414.512,00		91,10	1.068.243.747,00
5.1	BELANJA OPERASI				11.647.658.259,00		100,00	96,60		10.579.414.512,00		91,10	1.068.243.747,00
5.1.01	Belanja Pegawai				11.647.658.259,00		100,00	96,60		10.579.414.512,00		91,10	1.068.243.747,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN				6.358.043.459,00		54,57	50,76		5.593.642.864,00		48,02	762.400.595,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN				4.889.285.400,00		41,98	38,63		4.396.200.260,00		37,74	493.085.140,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS				4.500.000.000,00		38,63	38,63		4.125.940.160,00		35,42	374.059.840,00
	[#] Gaji Pokok PNS				4.500.000.000,00		38,63			4.125.940.160,00	91,69	35,42	374.059.840,00
	[-] Gaji Pokok PNS												
	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00		38,63	100,00	38,63	4.125.940.160,00	91,69	35,42	374.059.840,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK				389.285.400,00		3,34	0,00		270.260.100,00	69,42	2,32	119.025.300,00
	[#] Belanja Gaji Pokok PPPK				389.285.400,00		3,34			270.260.100,00	69,42	2,32	119.025.300,00
	[-] Belanja Gaji Pokok PPPK												
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1	Tahun	389.285.400,00	389.285.400,00		3,34	100,00	3,34	270.260.100,00	69,42	2,32	119.025.300,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN				471.916.664,00		4,05	3,58		364.551.370,00		3,13	107.365.294,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS				417.416.708,00		3,58	3,58		355.288.858,00		3,05	62.127.850,00
	[#] Tunjangan Keluarga PNS				417.416.708,00		3,58			355.288.858,00	85,12	3,05	62.127.850,00
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum												
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS												
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1	Tahun	417.416.708	417.416.708,00		3,58	100,00	3,58	355.288.858,00	85,12	3,05	62.127.850,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				54.499.956,00		0,47	0,00		9.282.512,00	17,00	0,08	45.237.444,00
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK				54.499.956,00		0,47			9.282.512,00	17,00	0,08	45.237.444,00
	Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan												
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga PPPK												
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1	Tahun	54.499.956,00	54.499.956,00		0,47	100,00	0,47	9.282.512,00	17,00	0,08	45.237.444,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN				140.515.741,00		1,21	1,21		140.515.741,00		1,21	0,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS				140.515.741,00		1,21	1,21		140.515.741,00		1,21	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS				140.515.741,00		1,21			140.515.741,00	100,00	1,21	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS												
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1	Tahun	140.515.741	140.515.741,00		1,21	100,00	1,21	140.515.741,00	100,00	1,21	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN				477.170.000,00		4,10			415.480.000,00	0,00	3,57	61.690.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS				440.000.000,00		3,78	3,78		391.585.000,00		3,36	48.415.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS				440.000.000,00		3,78			391.585.000,00	89,00	3,36	48.415.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional ASN												
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1	Tahun	440.000.000	440.000.000,00		3,78	100,00	3,78	391.585.000,00	89,00	3,36	48.415.000,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				37.170.000,00		0,32	0,32		23.895.000,00		0,21	13.275.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK				37.170.000,00		0,32			23.895.000,00	64,29	0,21	13.275.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional PPPK												
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	Tahun	37.170.000,00	37.170.000,00		0,32	100,00	0,32	23.895.000,00	64,29	0,21	13.275.000,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/6)x100 (%)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN				45.321.510,00		0,39		0,39	37.670.000,00		0,32	7.651.510,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				45.321.510,00		0,39		0,39	37.670.000,00		0,32	7.651.510,00
	[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS				45.321.510,00		0,39		0,39	37.670.000,00	83,12	0,32	7.651.510,00
	[-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS												
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1	Tahun	45.321.510,00	45.321.510,00		0,39	100,00	0,39	37.670.000,00	83,12	0,32	7.651.510,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras ASN				329.355.200,00		2,83		2,83	237.175.500,00		2,04	92.179.700,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS				288.800.000,00		2,48		2,48	226.747.020,00		1,95	62.052.980,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PNS				288.800.000,00		2,48		2,48	226.747.020,00	78,51	1,95	62.052.980,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PNS												
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PNS	1	Tahun	288.800.000,00	288.800.000,00		2,48	100,00	2,48	226.747.020,00	78,51	1,95	62.052.980,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK				40.555.200,00		0,35		0,35	10.428.480,00		0,09	30.126.720,00
	[#] Belanja Tunjangan Beras PPPK				40.555.200,00		0,35		0,35	10.428.480,00	25,71	0,09	30.126.720,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras PPPK												
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1	Tahun	40.555.200,00	40.555.200,00		0,35	100,00	0,35	10.428.480,00	25,71	0,09	30.126.720,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				2.400.000,00		0,02		0,02	1.977.130,00		0,02	422.870,00
	[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS				2.400.000,00		0,02		0,02	1.977.130,00	82,38	0,02	422.870,00
	[-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS												
5.1.01.01.08	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1	Tahun	2.400.000,00	2.400.000,00		0,02	100,00	0,02	1.977.130,00	82,38	0,02	422.870,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji ASN				78.944,00		0,00		0,00	72.863,00		0,00	6.081,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS				71.500,00		0,00		0,00	67.634,00		0,00	3.866,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS				71.500,00		0,00		0,00	67.634,00	94,59	0,00	3.866,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PNS												
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	71.500,00	71.500,00		0,00	100,00	0,00	67.634,00	94,59	0,00	3.866,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK				7.444,00		0,00		0,00	5.229,00		0,00	2.215,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji PPPK				7.444,00		0,00		0,00	5.229,00	70,24	0,00	2.215,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji PPPK												
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1	Tahun	7.444,00	7.444,00		0,00	100,00	0,00	5.229,00	70,24	0,00	2.215,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				5.291.614.800,00		45,43		45,84	4.985.771.648,00		43,07	305.843.152,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				5.291.614.800,00		45,43		45,84	4.985.771.648,00		43,07	305.843.152,00
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alo				5.243.614.800,00		41,61		41,61	4.606.931.648,00	95,06	39,55	239.579.152,00
	[-] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	4.846.510.800,00	4.846.510.800,00		41,61	100,00	41,61	4.606.931.648,00	95,06	39,55	239.579.152,00
	[-] Belanja Uang Lauk Pauk PNS												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	397.104.000,00	397.104.000,00		3,41	100,00	3,41	347.400.000,00	87,48	2,98	49.704.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				48.000.000,00		0,41		0,82	31.440.000,00		0,54	16.560.000,00
	[#] Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Sumber Dana : DAU Tambahan Dukungan Pend				48.000.000,00		0,41		0,41	31.440.000,00	65,50	0,27	16.560.000,00
	[-] Belanja Uang Lauk Pauk PNS												
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1	Tahun	48.000.000,00	48.000.000,00		0,41	100,00	0,41	31.440.000,00	65,50	0,27	16.560.000,00

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ade Saktiawan Amirullah, S.K.M., M.H.Kabag. TU		
2	Nurfaisah, S.K.M., M.Kes.	Kasubbag Pro & PK	
3	Retno Handayani	Staf Pro & PK	

Tarakan, 31 Desember 2024
Direktur ,


dr. Joko Haryanto, M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19761111 200502 1 002

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DESEMBER

Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02
Program : 1.02.01
Kegiatan : 1.02.01.2.02
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.02

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (RSUKT)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/6)x100 (%)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH/REALISASI FISIK & KEUANGAN				5.989.378.000,00	5.989.378.000,00	100,00		98,00	5.780.212.205,00		96,33	209.005.795,00
5.1	BELANJA OPERASI				5.989.378.000,00		100,00		98,00	5.780.212.205,00		96,33	209.005.795,00
5.1.01	Belanja Pegawai				101.796.000,00		1,70		1,70	99.346.000,00		1,48	2.290.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				101.796.000,00		1,70		1,70	99.346.000,00		1,48	2.290.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium				101.796.000,00		1,70		1,70	99.346.000,00		1,48	2.290.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan				58.956.000,00		0,98		0,98	58.956.000,00		0,98	0,00
	[#] Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan												
	[-] Bendahara Pengeluaran				13.080.000,00		0,22		0,22	13.080.000,00		0,22	0,00
	Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 mi...	12	Orang / Bulan	1.090.000,00	13.080.000,00		0,22	100,00	0,22	13.080.000,00	100,00	0,22	0,00
	[-] Operator Simda				6.000.000,00		0,10		0,10	6.000.000,00		0,10	0,00
	Operator Komputer SIMDA Keuangan/SIPD. Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	500.000,00	6.000.000,00		0,10	100,00	0,10	6.000.000,00	100,00	0,10	0,00
	[-] Pejabat Penatausahaan Keuangan				9.816.000,00		0,16		0,16	9.816.000,00		0,16	0,00
	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 50 ...	12	Orang / Bulan	818.000,00	9.816.000,00		0,16	100,00	0,16	9.816.000,00	100,00	0,16	0,00
	[#] Bendahara Pengeluaran Pembantu				7.260.000,00								
	[-] Bendahara Pengeluaran Pembantu				7.260.000,00		0,12		0,12	7.260.000,00		0,12	0,00
	Bendahara Pengeluaran Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 mi...	12	Orang / Bulan	605.000,00	7.260.000,00		0,12	100,00	0,12	7.260.000,00	100,00	0,12	0,00
	[#] Pembantu Pengurus Barang				14.400.000,00								
	[-] Pembantu Pengurus Barang				14.400.000,00		0,24		0,24	14.400.000,00		0,24	0,00
	Pembantu Pengurus Barang Spesifikasi : -	36	Orang / Bulan	400.000,00	14.400.000,00		0,24	100,00	0,24	14.400.000,00	100,00	0,24	0,00
	[#] Pengurus Barang Perangkat Daerah Lainnya/RSU Daerah				8.400.000,00								
	[-] Pengurus Barang Perangkat Daerah Lainnya/RSU Daerah				8.400.000,00		0,14		0,14	8.400.000,00		0,14	0,00
	Pengurus Barang Perangkat Daerah lainnya/RSU Daerah Spesifikasi : -	12	Orang / Bulan	700.000,00	8.400.000,00		0,14	100,00	0,14	8.400.000,00	100,00	0,14	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa				42.840.000,00		0,72		0,72	40.390.000,00		0,50	2.290.000,00
	[#] Pejabat Pembuat Komitmen				42.840.000,00								
	[-] Pejabat Pembuat Komitmen				42.840.000,00								
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar Spesifikasi : -	20	Orang / Bulan	1.610.000	32.200.000,00		0,54	100,00	0,54	29.910.000,00	92,89	0,50	2.290.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar Spesifikasi : -	8	Orang / Bulan	1.330.000	10.640.000,00		0,18	100,00	0,18	10.480.000,00	98,50	0,17	160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				5.887.582.000,00	5.884.822.000,00	98,30		96,30	5.680.866.205,00		94,85	206.715.795,00
5.1.02.02	Belanja Jasa				5.887.582.000,00	5.884.822.000,00	98,30		96,30	5.680.866.205,00		94,85	206.715.795,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/6)x100 (%)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				5.887.592.000,00	5.821.800.000,00	97,08		95,07	5.629.259.868,00		93,99	184.940.132,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan				5.814.200.000,00	5.821.800.000,00	97,08		95,07	5.629.259.868,00		93,99	184.940.132,00
	[#] Dokter Gigi				74.400.000,00								
	[-] Gaji Dokter Gigi												
	Dokter Gigi Spesifikasi : RSUKT	12	Orang /	6.200.000,00	74.400.000,00		1,24	100,00	1,24	74.400.000,00	100,00	1,24	0,00
	[#] Dokter Umum				1.060.800.000,00								
	[-] Gaji Dokter Umum												
	Dokter Umum Spesifikasi : RSUKT	156	Orang / Bulan	6.800.000,00	1.060.800.000,00		17,71	100,00	17,71	1.054.432.559,00	99,40	17,61	6.367.411,00
	[#] Gaji Belanja Dokter Spesialis Konservasi Gigi				120.000.000,00								
	[-] Gaji Dokter Spesialis Konservasi Gigi												
	Dokter Spesialis Gigi Konservasi Gigi Spesifikasi : Gaji Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	10.000.000,00	120.000.000,00		2,00	100,00	2,00	120.000.000,00	100,00	2,00	0,00
	[#] Gaji Dokter Spesialis				120.000.000,00								
	[-] Dokter Spesialis Bedah												
	Dokter Spesialis Bedah Spesifikasi : Gaji Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	10.000.000,00	120.000.000,00		2,00	100,00	2,00	120.000.000,00	100,00	2,00	0,00
	[#] Gaji Dokter Spesialis Anestesi				0,00								
	[-] Gaji Dokter Spesialis Anestesi												
	Dokter Spesialis Anestesi Spesifikasi : Gaji Dokter Spesialis (Non PNS)	0	Orang / Bulan	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[-] Insentif Dokter Spesialis Anestesi (Non PNS)												
	Dokter Spesialis Anestesi Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (Non PNS)	0	Orang / Bulan	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	[#] Gaji Dokter Spesialis Jantung				120.000.000,00								
	[-] Gaji Dokter Spesialis Jantung												
	Dokter Spesialis Jantung Spesifikasi : Gaji Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	10.000.000,00	120.000.000,00		2,00	100,00	2,00	120.000.000,00	100,00	2,00	0,00
	[#] Gaji Dokter Spesialis Penyakit Dalam				120.000.000,00								
	[-] Gaji Dokter Spesialis Penyakit Dalam												
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Spesifikasi : Gaji Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	10.000.000,00	120.000.000,00		2,00	100,00	2,00	120.000.000,00	100,00	2,00	0,00
	[#] Gaji Dokter Spesialis Saraf				120.000.000,00								
	[-] Gaji Dokter Spesialis Saraf												
	Dokter Spesialis Saraf Spesifikasi : Gaji Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	10.000.000,00	120.000.000,00		2,00	100,00	2,00	120.000.000,00	100,00	2,00	0,00
	[#] Gaji Dokter Tamu Spesialis				620.000.000,00								
	[-] Gaji Dokter Spesialis Tamu												
	Dokter Spesialis Tamu Spesifikasi : RSUKT	124	Orang / Bulan	5.000.000,00	620.000.000,00		10,35	90,32	9,35	510.227.279,00	82,29	8,52	109.772.721,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis				480.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis												
	Dokter Spesialis Anak Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	24	Orang / Bulan	20.000.000,00	480.000.000,00		8,01	100,00	8,01	480.000.000,00	100,00	8,01	0,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/5)x100 (%)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
	[#] Insentif Dokter Internship				180.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Internship												
	Insentif Dokter internship Spesifikasi : honor dokter internship	72	Orang / Bulan	2.500.000,00	180.000.000,00		3,01	100,00	3,01	180.000.000,00	100,00	3,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Penyakit Mulut				180.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Penyakit Mulut												
	Dokter Spesialis Penyakit Mulut Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	12	Orang / Bulan	15.000.000,00	180.000.000,00		3,01	100,00	3,01	180.000.000,00	100,00	3,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Bedah (Non PNS)				300.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Bedah (Non PNS)												
	Dokter Spesialis Bedah Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	25.000.000,00	300.000.000,00		5,01	100,00	5,01	300.000.000,00	100,00	5,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Gigi Prostodensia				30.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Gigi Protodensia												
	Beban Jasa Tenaga Kesehatan Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis Gigi Prostodensia...	2	Orang / Bulan	15.000.000,00	30.000.000,00		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Jantung (Non PNS)				306.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Gigi Anak (PNS)				30.000.000,00								
	Dokter Spesialis Gigi Anak Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (Non PNS)	2	Orang / Bulan	15.000.000,00	30.000.000,00		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
	[-] Insentif Dokter Spesialis Jantung (Non PNS)				276.000.000,00								
	Dokter Spesialis Jantung Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	12	Orang / Bulan	23.000.000,00	276.000.000,00		4,61	100,00	4,61	276.000.000,00	100,00	4,61	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Konservasi Gigi (Non PNS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				180.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Konservasi Gigi (Non PNS)												
	Dokter Spesialis Gigi Konservasi Gigi Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	15.000.000,00	180.000.000,00		3,01	100,00	3,01	180.000.000,00	100,00	3,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Obgyn				300.000.000,00					Oktober cuti sakit			
	[-] Insentif Dokter Spesialis Obgyn												
	Dokter Spesialis Kandungan/Obgyn Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	12	Orang / Bulan	25.000.000,00	300.000.000,00		5,01	100,00	5,01	300.000.000,00	100,00	5,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Patologi Klinik				180.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Patologi Klinik												
	Dokter Spesialis Patologi Klinik Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	12	Orang	15.000.000,00	180.000.000,00		3,01	100,00	3,01	180.000.000,00	100,00	3,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Penyakit Dalam				280.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PNS)												
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	14	Orang / Bulan	20.000.000,00	280.000.000,00		4,67	100,00	4,67	280.000.000,00	100,00	4,67	0,00

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/8)x100 (%)	Tertimbang (11/8)x8 (%)	
	[#] Insentif Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Non PNS) Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi U				240.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Non PNS)												
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	20.000.000,00	240.000.000,00		4,01	100,00	4,01	240.000.000,00	100,00	4,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Radiologi				180.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Radiologi												
	Dokter Spesialis Radiologi Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	12	Orang / Bulan	15.000.000,00	180.000.000,00		3,01	100,00	3,01	175.000.000,00	97,22	2,92	5.000.000,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik				180.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik												
	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (PNS)	12	Orang / Bulan	15.000.000,00	180.000.000,00		3,01	100,00	3,01	180.000.000,00	100,00	3,01	0,00
	[#] Insentif Dokter Spesialis Saraf (Non ASN)				204.000.000,00								
	[-] Insentif Dokter Spesialis Saraf (Non ASN)												
	Dokter Spesialis Saraf Spesifikasi : Insentif Daerah Dokter Spesialis (Non PNS)	12	Orang / Bulan	17.000.000,00	204.000.000,00		3,41	100,00	3,41	204.000.000,00	100,00	3,41	0,00
	[#] Insentif Penata anastesi Perbantuan				23.000.000,00								
	[-] Insentif Penata Anestesi Perbantuan												
	Penata Anastesi Spesifikasi : Insentif perbantuan RSUKT	115	Orang / Jam	200.000,00	23.000.000,00		0,38	100,00	0,38	19.200.000,00	83,48	0,32	3.800.000,00
	[#] Gaji Apoteker				216.000.000,00								
	[-] Gaji Apoteker												
	Apoteker Spesifikasi : RSUKT	48	Orang / Bulan	4.500.000,00	216.000.000,00		3,61	100,00	3,61	216.000.000,00	100,00	3,61	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi				73.382.000,00		1,23		1,23	51.606.337,00		0,86	21.775.663,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				73.382.000,00		0,61		0,61	28.670.187,00		0,48	7.711.813,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN				36.382.000,00		0,61						
	[-] Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN												
	BPJS Kesehatan non ASN Spesifikasi : -	36382000	Tahun	1,00	36.382.000,00		0,61	100,00	0,61	28.670.187,00	78,80	0,48	7.711.813,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN				37.000.000,00		0,62		0,62	22.936.150,00		0,38	14.063.850,00
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi				37.000.000,00					28670187			
	[-] Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN									22936150			
	JKK BPJS Ketenagakerjaan Spesifikasi : -	37000000	Tahun	1,00	37.000.000,00		0,62	100,00	0,62	22.936.150,00	61,99	0,38	14.063.850,00

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ade Saktiawan Amirullah, S.K.M., M.H.Kabag. TU		
2	Nurfaisah, S.K.M., M.Kes.	Kasubbag Pro & PK	
3	Retno Handayani	Staf Pro & PK	

Tarakan, 31 Desember 2024
Direktur ,


dr. Joko Haryanto, M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19761111 200502 1 002

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DESEMBER

Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02
Program : 1.02.01
Kegiatan : 1.02.01.2.10
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (RSUKT)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/6)x100 (%)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH/REALISASI FISIK & KEUANGAN				60.173.189.957,00	60.173.189.957,00	99,97		91,91	55.305.945.672,88		91,91	4.047.344.284,12
5,1	BELANJA OPERASI				54.168.027.957,00		90,02		84,33	50.743.385.077,88	19,84	84,33	3.424.642.879,12
5.1.01	Belanja Pegawai				1.043.700.000,00		1,73		0,34	207.062.876,00	19,84	0,34	836.637.124,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				1.043.700.000,00		1,73		0,34	207.062.876,00	19,84	0,34	836.637.124,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				1.043.700.000,00		1,73		0,34	207.062.876,00	19,84	0,34	836.637.124,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD				1.043.700.000,00		1,73		0,34	207.062.876,00	19,84	0,34	836.637.124,00
	[#] Belanja Pegawai BLUD				1.043.700.000,00								
	[-] Belanja Pegawai BLUD												
	Belanja Pegawai BLUD	1	Tahun	153.700.000,00	1.043.700.000,00		1,73	19,84	0,34	207.062.876,00	19,84	0,34	836.637.124,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				53.124.327.957,00		88,29		83,98	50.536.322.201,88		83,98	2.588.005.755,12
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				53.124.327.957,00		88,29		83,98	50.536.322.201,88		83,98	2.588.005.755,12
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				53.124.327.957,00		88,29		83,98	50.536.322.201,88		83,98	2.588.005.755,12
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				53.124.327.957,00		88,29		83,98	50.536.322.201,88		83,98	2.588.005.755,12
	[#] Belanja Barang dan Jasa				1.124.327.957,00								
	[-] BLUD RUMAH SAKIT UMUM Kota Tarakan												
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Tahun	1.124.327.957,00	1.124.327.957,00		1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.327.957,00
	[#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana : Pendapatan dari BLUD				52.000.000.000,00								
	[-] Belanja Barang dan Jasa BLUD												
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	Tahun	52.000.000.000,00	52.000.000.000,00		86,42	97,19	83,98	50.536.322.201,88	97,19	83,98	1.463.677.798,12
5.2	BELANJA MODAL				6.005.162.000,00		9,95		7,58	4.662.460.595,00		7,58	1.422.701.405,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				5.366.162.000,00		8,92		6,72	4.044.169.595,00		6,72	1.321.992.405,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				5.366.162.000,00		8,92		6,72	4.044.169.595,00		6,72	1.321.992.405,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				5.366.162.000,00		8,92		6,72	4.044.169.595,00		6,72	1.321.992.405,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				5.366.162.000,00		8,92		6,72	4.044.169.595,00		6,72	1.321.992.405,00
	[#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				5.366.162.000,00								
	[-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD												
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1	Tahun	3.005.000.000,00	5.366.162.000,00		8,92	75,38	6,72	4.044.169.595,00	75,36	6,72	1.321.992.405,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				619.000.000,00		1,03		0,86	518.291.000,00		0,86	100.709.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				619.000.000,00		1,03		0,86	518.291.000,00		0,86	100.709.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				619.000.000,00		1,03		0,86	518.291.000,00		0,86	100.709.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				619.000.000,00		1,03		0,86	518.291.000,00		0,86	100.709.000,00
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				619.000.000,00								
	[-] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD												
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1	Tahun	439.000.000,00	619.000.000,00		1,03	83,73	0,86	518.291.000,00	83,73	0,86	100.709.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				20.000.000,00		0,03		0,00	0,00		0,00	20.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				20.000.000,00		0,03		0,00	0,00		0,00	20.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				20.000.000,00		0,03		0,00	0,00		0,00	20.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				20.000.000,00		0,03		0,00	0,00		0,00	20.000.000,00
	[#] Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				20.000.000,00								
	[-] Belanja Modal Tanah BLUD												
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1	Tahun	20.000.000	20.000.000,00		0,03	0,00	0,00		0,00	0,00	20.000.000,00

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ade Saktiawan Amirullah, S.K.M., M.H., Kabag. TU		
2	Muhammad, S.K.M., M.Kes.	Kasubag Pro G PK	Ich
3	Retno Handayani	Staf Pro G PK	PR

Tarakan, 31 Desember 2024
Direktur

dr. Joko Haryanto, M.M
PEMBINA Tk I
NIP. 19761111 200502 1 002

Urusan Pemerintahan	: 1.02
Organisasi	: 1.02
Program	: 1.02.02
Kegiatan	: 1.02.02 2 01
Sub Kegiatan	: 1.02.01 2 01 05

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Rumah Sakit (RSUKT)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/8)x100 (%)	Tertimbang (11/8)x8 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH/REALISASI FISIK & KEUANGAN				3.634.863.843,00	3.634.863.843,00	100,00		100,00	3.347.097.871,00		92,08	287.765.972,00
5.2	BELANJA MODAL				3.634.863.843,00		100,00		100,00	3.347.097.871,00		92,08	287.765.972,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				3.634.863.843,00		100,00		100,00	3.347.097.871,00		92,08	287.765.972,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				3.634.863.843,00		100,00		100,00	3.347.097.871,00		92,08	287.765.972,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran				1.543.285.215,00		42,46		42,46	1.362.921.589,00		37,50	180.343.626,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis				460.497.740,00		12,67		12,67	306.000.000,00		8,42	154.497.740,00
	[#] Short Wave Diathermy (DAK)				206.470.000,00								
	[-] Short Wave Diathermy (DAK)												
	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1	Unit	206.470.000,00	206.470.000,00		5,68	100,00	5,68	206.000.000,00	99,77	5,67	470.000,00
	[#] Ultrasound Diathermy (DAK)				254.027.740,00								
	[-] Ultrasound Diathermy (DAK)												
	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1	Unit	254.027.740,00	254.027.740,00		6,99	100,00	6,99	100.000.000,00	39,37	2,75	154.027.740,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic				238.000.000,00		6,55		6,55	238.000.000,00		6,55	0,00
	[#] USG Portable				238.000.000,00								
	[-] USG Portable												
	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1	Unit	238.000.000,00	238.000.000,00		6,55	100,00	6,55	238.000.000,00	100,00	6,55	0,00
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi				844.767.475,00		23,24		23,24	818.921.589,00		22,53	25.845.886,00
	[#] Mesin Anestesi (DAK)				844.767.475,00								
	[-] Mesin Anestesi												
	Alat Kedokteran Anestesi	1	Unit	844.767.475,00	844.767.475,00		23,24	100,00	23,24	818.921.589,00	96,94	22,53	25.845.886,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum				2.091.598.628,00		57,54		57,54	1.984.176.282,00		54,59	107.422.346,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya				2.091.598.628,00		57,54		57,54	1.984.176.282,00		54,59	107.422.346,00
	[#] Autoclave				1.132.559.565,00								
	[-] Autoclave												
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	Unit	1.132.559.565,00	1.132.559.565,00		31,16	100,00	31,16	1.132.000.000,00	99,95	31,14	559.565,00
	[#] Bed Pasien 3 Motor (DAK)				194.734.785,00								
	[-] Bed Pasien 3 Motor (DAK)												
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	3	Unit	64.911.595,00	194.734.785,00		5,36	100,00	5,36	190.800.000,00	97,98	5,25	3.934.785,00
	[#] Infus Pump				119.878.000,00								
	[-] Infus Pump												
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4	Unit	29.969.500,00	119.878.000,00		3,30	100,00	3,30	104.400.000,00	87,09	2,87	15.478.000,00
	[#] Instrument Trolley				29.357.124,00								
	[-] Instrumen trolley												
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4	Unit	7.339.281,00	29.357.124,00		0,81	100,00	0,81	17.000.000,00	57,91	0,47	12.357.124,00
	[#] Neopuff				48.937.402,00								
	[-] Neopuff												
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2	Unit	24.468.701,00	48.937.402,00		1,35	100,00	1,35	47.660.552,00	97,39	1,31	1.276.850,00
	Spesifikasi : Neopuff (RSUKT)												
	[#] Patient Monitor				249.854.952,00								
	[-] Patient Monitor												
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2	Unit	124.927.476,00	249.854.952,00		6,87	100,00	6,87	184.320.730,00	73,77	5,07	65.534.222,00
	[#] Syringe Pump				111.894.000,00								
	[-] Syringe Pump												

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan		Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (8x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	4	Unit	27.973.500,00	111.894.000,00		3,08	100,00	3,08	108.000.000,00	96,52	3.894.000,00
	[#] Vena Viewer				204.382.800,00							
	[-] Vena Viewer											
	Alat Kesehatan Umum Lainnya	2	Unit	102.191.400,00	204.382.800,00		5,62	100,00	5,62	199.995.000,00	97,85	4.387.800,00

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ade Saktiawan Anirullah, S.KM., M.H.Kabag. TU		
2	Nurfaisah, S.KM.,M.Kes.	Kasublag Pro & PK	
3	Retno Handayani	Staf Pro & PK	

Tarakan, 3 Desember 2024
Direktur ,

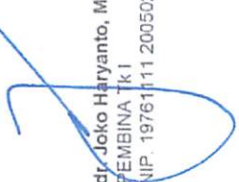
dr.  Joko Haryanto, M.M
PEMBINA Tk I
NIP. 19761111 200502 1 002

Figure 1

454

100

3

This is a vertical rectangular sheet of white paper featuring a light gray grid pattern. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 60 units high. There are no margins, text, or other markings on the page.

LAPORAN KONSOLIDASI PEMBANGUNAN KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOVEMBER

Urusan Pemerintahan : 1.02
Organisasi : 1.02
Program : 1.02.02
Kegiatan : 1.02.02.2.01
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14

Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kowenangan Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			Biaya Menurut DPA (Rp.)	Biaya Menurut KONTRAK (Rp.)	Bobot (%)	Perkembangan Fisik		Perkembangan Keuangan			Sisa Anggaran 6-11 (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)				Realisasi (%)	Tertimbang (6x9)/100 (%)	Realisasi (Rp.)	Keuangan (11/6)x100 (%)	Tertimbang (11/6)x8 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	BELANJA DAERAH/REALISASI FISIK & KEUANGAN				200.000.000,00	200.000.000,00	100,00		100,00	196.331.250,00		98,17	3.668.750,00
5.1	BELANJA OPERASI				121.745.000,00		100,00		100,00	196.331.250,00		98,17	3.668.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				121.745.000,00		100,00		100,00	196.331.250,00		98,17	3.668.750,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan				121.745.000,00		60,87		60,87	120.435.000,00		60,22	1.310.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				121.745.000,00		60,87		60,87	120.435.000,00		60,22	1.310.000,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi				121.745.000,00		60,87		60,87	120.435.000,00		60,22	1.310.000,00
	[#] Set Up Paviliun Rawat Inap				121.745.000,00		60,87		60,87	120.435.000,00		60,22	1.310.000,00
	[-] Set Up Paviliun Rawat Inap												
	Set Up Paviliun Rawat Inap Spesifikasi :	6451775305	M2	1.887.000,00	121.745.000,00		60,87	100,00	60,87	120.435.000,00	98,92	60,22	1.310.000,00
5.20	BELANJA MODAL				78.255.000,00		39,13		39,13	75.896.250,00		37,95	2.358.750,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				78.255.000,00		39,13		39,13	75.896.250,00		37,95	2.358.750,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				78.255.000,00		39,13		39,13	75.896.250,00		37,95	2.358.750,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga				78.255.000,00		39,13		39,13	75.896.250,00		37,95	2.358.750,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel				78.255.000,00		39,13		39,13	75.896.250,00		37,95	2.358.750,00
	[#] Sofa L				6.660.000,00								
	[-] Belanja Modal Mebel				6.660.000,00								
	Mebel Spesifikasi : Sofa L	2	M2	3.330.000,00	6.660.000,00		3,33	100,00	3,33	6.521.250,00	97,92	3,26	138.750,00
	[#] Sofa Lurus				26.640.000,00								
	Mebel Spesifikasi : Sofa Lurus	8	M2	3.330.000,00	26.640.000,00		13,32	100,00	13,32	24.420.000,00	91,67	12,21	2.220.000,00
	[#] Sofa Tiang				44.955.000,00								
	Mebel Spesifikasi : Sofa Tiang	15	M2	2.997.000,00	44.955.000,00		22,48	100,00	22,48	44.955.000,00	100,00	22,48	0,00

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Ade Saktiawan Amirullah, S.K.M., M.H. Kabag. TU		
2	Nurfaisah, S.K.M., M.Kes.	Kasubbag Pro & PK	
3	Retno Handayani	Staf Pro & PK	

Tarakan, 3 Desember 2024
Direktur,

dr. Joko Haryanto, M.M.
PEMBAWA TU I
NIP. 19761111 200502 1 002

LEMBAR ASISTENSI KESESUAIAN FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : PSUFT

Tanggal : 14/02/2025

Indikator Penilaian		Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan	Paraf analis
1.	LKIP telah menyajikan capaian dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	✓	✓		f
2.	LKIP telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	✓	✓		f
3.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	✓	✓	Sajikan per indikator	f 17/02
4.	LKIP telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	✓	✓	Tambahkan Grafik & benchmark kinerja Glud.	f 17/02
5.	LKIP telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	✓	indikator ke-3, bln mardani.	f 17/02
6.	LKIP telah menyajikan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	✓	analisis SDM	f 17/02
7.	LKIP menyajikan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai dengan foto/diagram/grafik	✓	✓	belum ada	f 17/02

8.	LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	-	-		
9.	LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya	✓	✓	upaya perbaikan hanya menge- lastkan tentang perbaikan kinerja SAKIP. belum keseluruhan kinerja.	↓ 19/02
	LKIP telah melampirkan :				
	a. IKU Perangkat Daerah				
	b. Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan				
	c. Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan				
	d. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja				
	e. Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan				

Kepala Bagian Organisasi,

Sisca Maya Crenata, S.STP, M.H
Pembina / Iva
Nip. 198509052003122001

8.	LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	-	-		
9.	LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya	✓	✓	upaya pembailan hanya menge- lasikan tentang pembailan kinerja SAKIP. belum keseluruhan kinerja.	19/02
	LKIP telah melampirkan :				
	a. IKU Perangkat Daerah				
	b. Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan				
	c. Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan				
	d. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja				
	e. Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan				

Kepala Bagian Organisasi,

Sisca Maya Crenata, S.STP, M.H
Pembina / Iva
Nip. 198509052003122001



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Jalan Aki Babu RT. 01 No. 170 Tarakan 77111

Telepon (0551) 3809788/+62 823-5230-1751; Fax: (0551) -

Laman: <http://dinkes.tarakankota.go.id/rsukt> Pos-el: rsukotatarakan@gmail.com

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 000.5.3.1/2524/RSUKT/2024

Yth.
Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
Di—
Tarakan

No.	Dokumen Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1	Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	1 Berkas	Disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

23 September 2024
Direktur,
dr. Joko Haryanto, MM
Pembina Tingkat I IV.b
NIP. 197611112005021002

BerAKHLAK
Berakhlak: Berakhlak, Berakhlak, Berakhlak
Berakhlak: Berakhlak, Berakhlak, Berakhlak

**bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN

Jalan Aki Babu RT. 01 No. 170 Tarakan 77111

Telepon (0551) 3809788/+62 823-5230-1751; Fax: (0551) -

Laman: <http://dinkes.tarakankota.go.id/rsukt> Pos-el: rsukotatarakan@gmail.com

SURAT PENGANTAR
NOMOR: 000.5.3.1/2524/RSUKT/2024

Yth.
Inspektur Inspektorat Kota Tarakan
Di—
Tarakan

No.	Dokumen Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1	Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi SAKIP Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	1 Berkas	Disampaikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.
1. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tarakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

23 September 2024
Direktur
dr. Joko Haryanto, MM
Pembina Tingkat I IV.b
NIP. 19761112005021002

BerAKHLAK
Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**

RENCANA AKSI
TNDK LANJUT REKOMENDASI SAKIP RSU KOTA TARAKAN

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
1)	Evaluasi Perencanaan Kinerja. Tim Penyusun SAKIP RSUKT belum membuat hal berikut, yaitu:	Agar Tim Penyusun SAKIP RSUKT segera menyusun dan membuat dokumen sebagai berikut:	RSU Kota Tarakan telah/akan melakukan:	
a	Rencana aksi atas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung indikator sasaran.	Rencana aksi atas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung indikator sasaran	Penyusunan dan pengumpulan Rencana Kerja Tahunan seluruh bidang untuk T.A 2024 dengan menyesuaikan pada APBD-P T.A 2024	Oktober 2024
b	Diagram cascading yang menggambarkan hubungan keterkaitan dan keselarasan kinerja antar level jabatan	Diagram cascading yang menggambarkan hubungan keterkaitan dan keselarasan kinerja antar level jabatan	RSUKT telah melakukan penyusunan cascading untuk pelaksanaan kegiatan T.A 2024 (dokumenter terlampir)	Sudah dilaksanakan
c	Diagram crosscutting yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang dan tugas fungsi yang saling terkait antar level bidang	Diagram crosscutting yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang dan tugas fungsi yang saling terkait antar level bidang	Tim SAKIP akan berkonsultasi dengan Bagian Organisasi dan Dinas Kesehatan perihal penyusunan diagram crosscutting RSU Kota Tarakan	Oktober 2024
2)	Evaluasi Pengukuran Kinerja. Tim Penyusun SAKIP RSUKT belum melakukan:	Agar Tim Penyusun SAKIP RSUKT segera menyusun dan membuat dokumen sebagai berikut:	RSU Kota Tarakan telah/akan melakukan:	
	a. Dokumen rencana aksi tahun 2023; b. Laporan monev rencana aksi triwulan (I-IV); c. Laporan evaluasi kinerja triwulan (I-IV)	Agar pengukuran kinerja tetap dilaksanakan secara berjenjang sampai ke tingkatan jenjang JFT ahli muda/sub koordinator bila pengampu jabatan tersebut memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab kinerja yang selevel dengan pengampu jabatan eselon IV Perlu dilakukan pengukuran kinerja atas aktivitas berkala yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang diukur melalui bukti (monev rencana aksi kinerja secara berkala/triwulan)	1. Menyusun jadwal monev kinerja untuk T.A 2024; 2. Melaksanakan monev kinerja sesuai jadwal dengan format pengukuran kinerja; 3. Mendokumentasikan RTL monev kinerja (dokumentasi terlampir); 4. Memfasilitasi pelaksanaan dialog kinerja per bidang.	2. Monev kinerja Triwulan III (Oktober 2024)

No.	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
3)	Evaluasi Pelaporan Kinerja. Tim Penyusun SAKIP dalam menyusun laporan kinerja belum menyajikan dan menganalisis:	Laporan Kinerja yang akan datang agar dapat menyajikan:	RSU Kota Tarakan akan melaksanakan:	
a	Perbandingan antara realisasi capaian tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah pada RPJMD/Renstra.	a. Analisis perbandingan antara realisasi capaian tahun 2024 dengan target kinerja RPJMD/renstra	1. Menjadwalkan revidu capaian kinerja RSU Kota Tarakan T.A 2024 dengan Bappeda dan Litbang Kota Tarakan dan Dinas Kesehatan Kota Tarakan terkait pencapaian kinerja RPJMD/Renstra dan Target Nasional;	Desember 2024 dan Januari-Februari 2025
b	Perbandingan antara realisasi capaian tahun 2023 dengan target kinerja nasional (benchmarking)	b. Analisa perbandingan antara realisasi capaian 2024 dengan target nasional; dan	2. Menyajikan analisis capaian kinerja RSUKT T.A 2024 dengan target RPJMD dan target nasional;	
c	bukti tindak lanjut perbaikan atas hasil rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya	c. Tindak lanjut perbaikan atas hasil rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya.	3. Menyampaikan dan menyajikan tindak lanjut perbaikan atas hasil rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun 2023.	
4)	Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal. Tim Penyusun SAKIP dalam melakukan evaluasi AKIP internal belum melakukan:	Agar Tim Penyusun SAKIP RSUKT melaksanakan:	Tim SAKIP RSU Kota Tarakan akan melaksanakan:	
a	Monev rencana aksi kinerja triwulanan	Monev rencana aksi triwulan secara terjadwal	1. Jadwal pelaksanaan monev rencana aksi triwulan dalam dalam dokumen Rencana Aksi Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja T.A 2024;	Oktober 2024
b	Monev akuntabilitas kinerja internal serta rapat evaluasi internal terkait pencapaian indikator sasaran, program/kegiatan sesuai PK dan IKU.	Monev akuntabilitas kinerja internal serta evaluasi internal terkait pencapaian indikator sasaran, program/kegiatan sesuai PK dan IKU	2. Melakukan monev pencapaian indikator program/kegiatan sesuai PK dan IKU; 3. Mendokumentasikan kegiatan pengukuran kinerja berjenjang triwulanan.	



Mengetahui
Direktur
dr. Joko Haryanto, M.M.
Pembina Tingkat I IV.b

**RENCANA AKSI
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM RS	100%	100%	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Penyediaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	26 unit	Pengadaan alkes bersumber dana APBD	3,634,863,843					Bidang Penunjang
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	Pengadaan dan pemeliharaan alkes dan alat penunjang bersumber dana BLUD						Bidang Penunjang
												Monitoring Capaian SPM						Semua Bidang/ Bagian
		Persentase Pemenuhan Sumber Daya RS Sesuai Standar	70%	70%	70%	70%		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah/ Kabupaten/ Kota	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah RS yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1: 1000 dan/atau dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 unit	Pengadaan meubelair RS dan Sep Up Gedung Paviliun	200,000,000					Bidang Penunjang

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	Pembangunan/ Rehab Instalasi VK dan IGO, Taman Area Parkir, dan Rehab Masjid RSUKT						Bidang Penunjang
											Pemeliharaan Bangunan RS						Bidang Penunjang
											Pemenuhan obat, BMHP dan Logistik RS						Bidang Penunjang
2	Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di RS	83	83	83	83	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Publikasi Hasil Survey IKM	60.173,189,957				Bidang Humas
											Penanganan Komplain Layanan RS						Bidang Humas
											Monev dan penyusunan laporan pemenuhan kewajiban RS						Bidang Humas
											Monev dan penyusunan laporan pemenuhan hak Pasien di RS						Bidang Humas
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	Nilai Evaluasi Kinerja RS	83	83	83	83	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Tenaga ASN	11.647,658,259				Bagian Tata Usaha dan Keuangan
											Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Tenaga BLUD						Bagian Tata Usaha dan Keuangan
											Penyusunan Laporan Kinerja RS '						Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Waktu Pelaksanaan				Ket
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
	Nilai Tata Kefola dan Akuntabilitas Kinerja RS	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)	70-80 (Baik)			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	Pengelolaan Gaji, Insentif, Honorarium dan Jaminan Ketenagakerjaan	5,989.378,000					Bagian Tata Usaha dan Keuangan
											Penyusunan Laporan Kinerja RS						Bagian Tata Usaha dan Keuangan
	Nilai Maturitas Pengelolaan Manajemen Risiko RS	3,0 (Terdefinisi)	3,0 (Terdefinisi)	3,0 (Terdefinisi)	3,0 (Terdefinisi)						Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko RS dan Monitoring Pelaksanaan Manajemen Risikodi RS						Komite Mutu, Semua Bidang dan Bagian

Mengetahui,
Direktur RSU Kota Tarakan

Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan

dr. Joko Haryanto, MM
NIP. 197611112005021002

Ade Saktiawan Amirullah, SKM, MH
NIP. 198510012010011003

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			Selisih	KETERANGAN (kalau ada perubahan pagu, mohon insert note terus mention mb.murindayah@gmail.com)		
		SEMULA	MEJADI	SEMULA	MEJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	DINAS KESEHATAN								137,192,410,891	167,548,332,188	181,722,917,549	24,174,085,361	DINKES	DINKES	Urusan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								137,192,410,891	167,548,332,188	181,722,917,549		DINKES	DINKES	Total
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100 %	100 %	100 %	105,886,935,888	120,973,983,424	140,395,121,535		120,973,983,424.00	DINKES	Program
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	10 layanan	10 layanan	10 layanan	38,151,483,208	38,467,542,981	38,743,542,981			DINKES	Kegiatan
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	292 Orang/bul an	292 Orang/bul an	352 Orang/bul an	33,118,547,208	33,429,806,981.00	33,705,806,981.00		276,000,000.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,032,936,000	5,037,736,000.00	5,037,736,000.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	1 layanan	1 layanan	2 Layanan	5,000,000	6,000,000	29,100,000			DINKES	Kegiatan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	1 Unit	9,000,000	6,000,000.00	6,000,000.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Pengadaan Paksa Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Paksa Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Paksa Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Paksa Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 pcs	0 pcs	68 PCS	0	0	23,100,000		23,100,000	DINKES	Sub Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	4 layanan	4 layanan	4 layanan	224,984,070	248,290,098	628,290,098			DINKES	Kegiatan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10,000,000	10,059,058.00	390,059,058.00		380,000,000.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	119,990,070	119,989,240.00	119,989,240.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	44,994,000	44,994,000.00	44,994,000.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	73,247,800.00	73,247,800.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset/BMD yang diadakan	Jumlah aset/BMD yang diadakan	7 unit	31 unit	31 unit	128,151,010	1,372,970,718	1,440,247,158			DINKES	Kegiatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	30,000,000	27,759,114.00	27,759,114.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	73,151,010	752,504,404.00	819,780,844.00		87,278,440.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	25,000,000	592,707,200.00	592,707,200.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	3 layanan	3 layanan	3 layanan	1,479,400,000	1,338,140,710	1,234,000,710			DINKES	Kegiatan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	13,000,000.00	13,000,000.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	750,000,000	609,220,710.00	505,080,710.00		-104,140,000.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	718,400,000	715,920,000.00	715,920,000.00		0.00	DINKES	Sub Kegiatan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	257 Unit	82 Unit	83 Unit	709,063,500	784,997,691	841,137,691			DINKES	Kegiatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit	2 Unit	2 Unit	36,301,100	18,910,680.00	18,910,680		0	DINKES	Sub Kegiatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	14 Unit	15 Unit	277,762,400	278,033,511.00	311,693,511		33,660,000	DINKES	Sub Kegiatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	63 Unit	63 Unit	45,000,000	45,369,500.00	67,849,500		22,480,000	DINKES	Sub Kegiatan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0 Unit	300,000,000	0	0		0	DINKES	Sub Kegiatan

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			Selisih	KETERANGAN (khusus ada perubahan pagu, mohon insert note terus mention mb.nurlinadiyah@gmail.com.)		
		SEMULA	MEJADI	SEMULA	MEJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		12		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	3 Unit	3 Unit	50,000,000	442,684,000.00	442,684,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 unit	7 unit	7 unit	8,431,600,000	16,119,014,967	19,578,576,680			DINKES	Kegiatan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	7 Unit Kerja	7 Unit Kerja	7 Unit Kerja	8,431,600,000	16,119,014,967.00	19,578,576,680		3,459,561,713	DINKES	Sub Kegiatan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	10 layanan	10 layanan	10 layanan	16,753,253,800	17,637,036,259	17,637,036,259			DINKES	Kegiatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	934 Orangbul an	1068 Orangbul an	1068 Orangbul an	10,763,875,800	11,647,658,259.00	11,647,658,259			RSUKT	Sub Kegiatan
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5,989,378,000	5,989,378,000.00	5,989,378,000			RSUKT	Sub Kegiatan
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit	1 unit	1 unit	40,000,000,000	45,000,000,000	60,173,189,958			DINKES	Kegiatan
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	40,000,000,000	45,000,000,000.00	60,173,189,958			RSUKT	Sub Kegiatan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita	Angka Kematian Balita	6/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH	29,245,438,933	33,690,868,414	28,334,438,154		33,690,868,414.00	DINKES	Program
				Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Bayi	6/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH						DINKES	Program
				Angka Kematian Ibu Melahirkan	Angka Kematian Ibu Melahirkan	2/1000 KH	2/1000 KH	2/1000 KH						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan balita	Pelayanan kesehatan balita	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan ibu hamil	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan pada usia lansia	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	0.6								DINKES	Program
				Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100 %								DINKES	Program
				Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	0.07								DINKES	Program
				Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	3 Persean								DINKES	Program
				Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100 %	100 %	100 %						DINKES	Program

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			Selisih	KETERANGAN (Kalau ada perubahan pagu, mohon insert note terus mention mb.nurlinidyah@gmail.com)		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memiliki Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah UPT yang memiliki Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	8 UPT	8 UPT	8 UPT	5,845,940,800	7,319,658,781	7,294,651,800			DINKES	Kegiatan
		Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0	6 Unit	6 Unit	0	2,739,116,321	2,733,108,320		-6,008,001	DINKES	Sub Kegiatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	792,763,000	700,000,000	700,000,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1,816,225,000	180,000,000	180,000,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1,268,960,140	1,325,117,140	1,325,117,140		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0 Unit	7 Unit	7 Unit	0	400,000,000	400,000,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1,906,000,000	1,906,000,000	1,887,001,020		-18,998,980	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	100 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	24,992,660	29,425,320	29,425,320		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	3 Paket	3 Paket	3 Paket	40,000,000	40,000,000	40,000,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RS Rujukan Kabupaten Kota yang memenuhi Sarpras dan Akses sesuai Standar	Jumlah RS Rujukan Kabupaten Kota yang memenuhi Sarpras dan Akses sesuai Standar	1 RS	1 RS	1 RS	6,334,863,843	3,634,863,843	3,634,863,843			DINKES	Kegiatan
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUKT)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	120 Unit	120 Unit	120 Unit	2,134,863,843	3,634,863,843	3,634,863,843		RSUKT	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengembangan Rumah Sakit (RSUKT)	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4,200,000,000	200,000,000	200,000,000		RSUKT	DINKES	Sub Kegiatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan	8 UPT	8 UPT	8 UPT	16,879,944,290	22,267,757,090	27,136,333,811			DINKES	Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4,792 Orang	5 Orang	4,8 Orang	209,688,600	307,446,800	307,446,800		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4,806 Orang	4,8 Orang	4,8 Orang	85,037,000	246,717,000	246,717,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang	4,7 Orang	4,7 Orang	0	230,164,421	230,164,421		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7,500 Orang	10 Orang	10 Orang	187,815,480	150,000,000	150,000,000		0	DINKES	Sub Kegiatan

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			Selisih	KETERANGAN (Kalau ada perubahan pagu, mohon insert note terus mention mb.nurlinadiah@gmail.com)		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4,275 Orang	38,74 Orang	38,74 Orang	152,740,000	350,880,000	350,880,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	26,984 Orang	60 Orang	60 Orang	138,540,000	138,492,630	138,492,630		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1,600 Orang	7,5 Orang	7,5 Orang	87,399,670	64,947,850	64,947,850		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10,708 Orang	26,43 Orang	26,43 Orang	66,805,000	62,388,810	62,388,810		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3,551 Orang	5,08 Orang	5,08 Orang	89,514,000	293,762,800	293,762,800		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	320 Orang	424 Orang	424 Orang	50,900,000	28,770,500	28,770,500		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5,822 Orang	5,78 Orang	5,78 Orang	74,623,140	1,159,588,240	1,159,588,240		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6,677 Orang	6,838 Orang	6,838 Orang	42,368,700	194,950,000	194,950,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	700,770,000	266,338,750	266,338,750		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	1,391,412,640	2,113,571,027	2,113,571,027		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	19,200,000	1,200,000	1,200,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	579,016,500	1,023,102,520	1,023,102,520		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	248,650,000	213,562,100	213,562,100		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	65,182,800	478,471,800	478,471,800		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1 Orang	40386 Orang	40386 Orang	25,756,000	39,867,330	39,867,330		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	11500 Orang	11500 Orang	0	39,376,960	39,376,960		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	142,000,000	1,560,403,764	1,560,403,764		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	10,724,688,320	10,724,688,320	15,587,422,000		4,862,733,680	DINKES	Sub Kegiatan
		Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Diri Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	500 Orang	350 Orang	350 Orang	39,350,000	39,140,000	39,140,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49,127,200	61,617,000	61,617,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	59,803,640	14,409,150	14,409,150		0	DINKES	Sub Kegiatan

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			Selisih	KETERANGAN (jika ada perubahan pagu, mohon insert note terus mention mb.nurlindayah@gmail.com)		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayari Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayari Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	7 Unit	7 Unit	7 Unit	65,855,500	66,503,488	108,913,989		42,410,501	DINKES	Sub Kegiatan
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	399,375,000	690,913,000	690,913,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	890,234,500	934,749,910	934,749,910		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	1 Unit	119,897,600	146,210,300	109,642,840		-30,567,460	DINKES	Sub Kegiatan
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iktan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	8,600,000	8,600,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,079 Orang	1,079 Orang	1,079 Orang	30,680,000	24,320,000	24,320,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56 Orang	56 Orang	56 Orang	22,350,000	37,005,500	37,005,500		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	461 Orang	461 Orang	461 Orang	86,185,000	108,109,000	108,109,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0	31,500,000	31,500,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	0	415,988,320	415,988,320		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah UPT yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah UPT yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	6 UPT	6 UPT	6 UPT	20,000,000	70,970,000	70,970,000			DINKES	Kegiatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	70,970,000	70,970,000		124,520,000.00	DINKES	Sub Kegiatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	7 unit	7 unit	7 unit	152,290,000	197,619,700	197,619,700			DINKES	Kegiatan
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	7 Unit	7 Unit	7 Unit	152,290,000	197,619,700	197,619,700		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	6 unit	6 unit	6 unit	11,400,000	0	0			DINKES	Kegiatan
		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	1 Unit	11,400,000	0	0		0	DINKES	Sub Kegiatan
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100 Person	100 Person	100 Person	264,389,400	562,030,810	561,918,310		562,030,810.00	DINKES	Program
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Izin Praktik Tenaga Kesehatan	Izin	Izin	Izin	2,400,000	0	0			DINKES	Kegiatan
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2,400,000	0	0		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk URP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang terpenuhi Kebutuhan SDM sesuai Standar	Jumlah UPT yang terpenuhi Kebutuhan SDM sesuai Standar	8 Upt	8 Upt	8 Upt	81,729,400	97,007,980	97,007,980			DINKES	Kegiatan

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			Selisih	KETERANGAN (khusus ada perubahan pagu, mohon insert note terus mention mb.nurlinadiah@gmail.com)				
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024					RKPD PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13			
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	70 Orang	0 Orang	0 Orang	81,729,400	0	0			0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	0	97,007,980	97,007,980			0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	8 Upt	8 Upt	8 Upt	180,240,000	465,022,830	464,910,330				DINKES	Kegiatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 Orang	30 Orang	30 Orang	180,240,000	465,022,830	464,910,330			-112,500	DINKES	Sub Kegiatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	36,874,970	455,283,550	455,283,550			455,283,550.00	DINKES	Program
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi Izin yang diterbitkan	25 dokumen	25 dokumen	25 dokumen	19,999,970	0	0				DINKES	Kegiatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	19,999,970	0	0			0	DINKES	Sub Kegiatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Jumlah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	596 Sertifikat	596 Sertifikat	596 Sertifikat	8,275,000	255,886,950	255,886,950				DINKES	Kegiatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	23 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	8,275,000	255,886,950	255,886,950			0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	8,600,000	199,396,600	199,396,600				DINKES	Kegiatan
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	8,600,000	199,396,600	199,396,600			0	DINKES	Sub Kegiatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	1,768,782,000	1,866,155,000	1,866,155,000				DINKES	Program
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	1,652,400,000	1,676,000,000	1,676,000,000				DINKES	Kegiatan
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,652,400,000	1,676,000,000	1,676,000,000			0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan lintas sektor yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat	Jumlah OPD dan lintas sektor yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat	30 mitra	30 mitra	30 mitra	87,192,000	50,000,000	50,000,000				DINKES	Kegiatan

No.	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)/SUBKEGIATAN (SUBOUTPUT)		TARGET			PAGU			Selisih	KETERANGAN (klausur ada perubahan pagu, mohon insert note terus mention mb.murliandiyah@gmail.com)		
		SEMULA	MENJADI	SEMULA	MENJADI	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN	RKPD 2024	PENJABARAN APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	87,192,000	50,000,000	50,000,000		0	DINKES	Sub Kegiatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	10 kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	19,200,000	140,155,000	140,155,000			DINKES	Kegiatan
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	19,200,000	140,155,000	140,155,000		0	DINKES	Sub Kegiatan



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jl. Sulawesi No. 1 Telp. (0551) 21072-21859, Tarakan 77121

Laman : <http://itwil.tarakankota.go.id>

Pos-el : inspektorat@tarakankota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

OLEH TIM REVIU KINERJA
INSPEKTORAT KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Kota Tarakan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi dalam Laporan Kinerja yang disajikan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.

Tarakan, 27 Februari 2025

Inspektur,


ABD. AZIS HASAN, A.P, M.H.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19750212 199501 1 001

**KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	-